

**KEBIJAKAN SANKSI EKONOMI JEPANG TERHADAP RUSIA ATAS
INVASI KE UKRAINA PADA ERA KEPEMIMPINAN FUMIO KISHIDA**

TAHUN 2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NOVIRA INDAH TRIYANA

18323104

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**KEBIJAKAN SANKSI EKONOMI JEPANG TERHADAP RUSIA ATAS
INVASI KE UKRAINA PADA ERA KEPEMIMPINAN FUMIO KISHIDA**

TAHUN 2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NOVIRA INDAH TRIYANA

18323104

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Kebijakan Sanksi Ekonomi Jepang terhadap Rusia Atas Invasi ke Ukraina

Pada Era Kepemimpinan Fumio Kishida Tahun 2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Enggar Furi Herdianto
Hadza Min Fadhli Robby

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

12 Februari 2025.



Novira Indah Triyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>16</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>16</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian.....</i>	<i>17</i>
1.9 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB 2 KONTEKS INTERNASIONAL	18
2.1. Geografis.....	18
2.1.1. Letak Strategis Jepang di Asia Timur	19
2.1.2. Ancaman Aktivitas Militer Rusia di Asia Timur	20
2.1.3. Sengketa Wilayah Kepulauan Kuril Selatan	22
2.2 Ekonomi.....	29
2.2.1. Tekanan Ekonomi Global	29
2.2.2. Kedekatan Hubungan Jepang dan Rusia.....	30
2.2.2. Ketergantungan Energi Jepang pada Rusia.....	32
2.3. Politik.....	35
2.3.1. Aliansi Jepang dengan Amerika Serikat dan Negara G7.....	36
BAB 3 KAPABILITAS EKONOMI DAN POLITIK	39
3.1. Kapabilitas Ekonomi Jepang Dalam Pemberian Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia.....	39
3.1.1. Ekonomi Jepang	39
3.1.2. Kerja sama dalam Organisasi Ekonomi Internasional	40

3.2. Kapabilitas Militer Jepang Dalam Pemberian Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia	42
3.2.1. Kekuatan Militer Jepang	42
3.2.2. Modernisasi militer Jepang	44
3.2.3. Aliansi Militer Jepang.....	46
BAB 4 POLITIK DOMESTIK	49
4.1. <i>Partisan Influencer</i> atau Peran Pemerintah dan Partai Politik	49
4.2. <i>Bureaucratic Influencer</i> atau Peran Birokrasi Pemerintahan	51
4.3. <i>Interest Influencer</i> atau Peran Kelompok Kepentingan.....	52
4.4. <i>Mass Influencer</i> atau Peran Masyarakat.....	54
BAB 5 PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Teori Pengambilan Keputusan dari William D. Coplin.....	14
Gambar 2.1.1 Peta Sengketa Kepulauan Kuril.....	23
Gambar 2.2.1 Sumber Utama Impor Komoditas Energi Jepang Berdasarkan Pangsa Pasar Pada Tahun 2021	33
Gambar 2.2.2 Sumber Utama Impor Komoditas Energi Jepang Berdasarkan Pangsa Pasar Pada Tahun 2022	34
Tabel 5.1.1 Kesimpulan	59

DAFTAR SINGKATAN

NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
LNG	: <i>Liquefied Natural Gas</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
SLOC	: <i>Sea Lanes of Communication</i>
NSS	: <i>National Security Strategy</i>
NDS	: <i>National Defense Strategy</i>
DBP	: <i>Defence Build-up Programme</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
JSDF	: <i>Japan Self-Defense Force</i>
QUAD	: <i>Quadrilateral Security Dialogue</i>
LDP	: <i>Liberal Democratic Party</i>
CPTPP	: <i>Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership</i>

ABSTRAK

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi salah satu peristiwa geopolitik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri berbagai negara, termasuk Jepang. Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Fumio Kishida menerapkan sanksi ekonomi yang lebih tegas dibandingkan pada era sebelumnya terhadap Rusia. Sehingga, pada penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Jepang dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan menggunakan teori Pengambilan Keputusan dari William D. Coplin. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi Jepang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu pertama konteks internasional, di mana Jepang sebagai anggota G7 dan sekutu Amerika Serikat mendukung stabilitas tatanan global. Kedua, kapabilitas ekonomi dan militer yaitu Jepang memiliki kekuatan ekonomi yang besar sehingga dapat mengimbangi kapabilitas militer Jepang yang terbatas untuk dapat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Ketiga, politik domestik yaitu di mana pemerintahan, birokrasi, kepentingan kelompok, dan opini masyarakat berkontribusi dalam keputusan untuk menjatuhkan sanksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Jepang tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal tetapi faktor internal telah memperkuat legitimasi kebijakan.

Kata-kata kunci: Jepang, Rusia, Sanksi Ekonomi, Teori Pengambilan Keputusan.

ABSTRACT

The Russian invasion of Ukraine in 2022 became one of the geopolitical events that influenced the foreign policies of various countries, including Japan. Under the leadership of Prime Minister Fumio Kishida, Japan implemented stricter economic sanctions against Russia compared to previous eras. Therefore, this research aims to analyze the factors influencing Japan's decision-making in imposing economic sanctions on Russia using William D. Coplin's Decision-Making Theory. The final results of the study indicate that Japan's sanction policy is influenced by three main factors: first, the international context, where Japan, as a member of the G7 and an ally of the United States, supports the stability of the global order. Second, economic and military capabilities, where Japan's significant economic strength allows it to offset its limited military capabilities in imposing sanctions on Russia. Third, domestic politics, where the government, bureaucracy, interest groups, and public opinion contribute to the decision to impose sanctions. This research shows that Japan's decision was not only influenced by external pressure but also by internal factors that strengthened the legitimacy of the policy.

Keywords: Japan, Russia, Economic Sanctions, Decision-Making Theory

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 24 Februari 2022 terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina dalam skala besar, Rusia telah memulai operasi militer khusus di Ukraina Timur yang mana ini dampaknya membuat ribuan warga Ukraina kehilangan nyawa. Konflik invasi Rusia ke Ukraina merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian di Eropa (Mankoff 2022). Invasi ini merupakan serangan untuk menguasai dan mengubah pemerintahan negara Ukraina secara paksa, Rusia memutuskan bahwa negara Ukraina tidak boleh menjauhkan diri dari Rusia untuk lebih dekat dengan negara barat dan juga Rusia menolak status kenegaraan Ukraina. Konflik ini merupakan konflik kedua Rusia dan Ukraina, sebelumnya di tahun 2014 Rusia telah melakukan aneksasi di Krimea yang diklaim oleh Ukraina (Brunk and Hakimi 2022).

Penyerangan tersebut mengejutkan dunia internasional, Presiden Putin dalam pidatonya menyampaikan bahwa Presiden Putin melakukan operasi militer khusus untuk melindungi warga negaranya yang berada di Ukraina Timur yang telah menjadi korban penindasan dan genosida dari rezim Ukraina dan akan berjuang demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina (Osborn and Nikolskaya 2022). Selain itu juga operasi militer khusus terjadi akibat presiden Ukraina Zelensky berencana mendorong Ukraina untuk bergabung ke dalam NATO dan berusaha memisahkan diri dari Rusia dan bergabung dengan negara-negara barat, hal tersebut memicu Rusia melakukan tindakan militer di Ukraina (Shynkaruk 2023).

Selain itu, dari penyerangan tersebut dampaknya tidak hanya mempengaruhi stabilitas keamanan negara di Eropa tetapi juga mengganggu stabilitas Internasional seperti inflasi yang tinggi, tekanan finansial yang tinggi membuat lembaga-lembaga keuangan mengalami kerugian, krisis kemanusiaan banyaknya korban jiwa dan banyak warga negara Ukraina yang meninggalkan Ukraina untuk mengungsi, mengganggu perdagangan dan menambah tekanan terhadap produksi komoditas pertanian dan energi. Tindakan Rusia dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat atas hukum internasional dan memicu perubahan dalam kebijakan luar negeri negara di sekitarnya. Negara-negara barat yang tergabung dalam G7 memberikan sanksi ekonomi yang berat kepada Rusia agar berhenti melakukan serangan ke Ukraina (Guenette, Kenworthy, and Wheeler 2022).

Dalam peristiwa ini Jepang di kelompok G7 menghadapi kendala besar dalam menangani konflik ini. Negara barat memboikot ekonomi dengan Rusia, khususnya dalam ekspor utama Rusia yaitu produk energi. Tentunya memberikan dampak yang memberatkan terhadap pasar global karena banyak negara-negara yang bergantung kepada impor minyak dan gas alam Rusia. Jepang sangat rentan terhadap masalah di pasar energi global karena Jepang kurang dalam sumber daya energi dan sangat mengandalkan impor untuk hampir seluruh pasokan energinya. Jepang di satu sisi memiliki hubungan ekonomi dengan Rusia terkait dalam hal impor energi, Jepang telah memandang Rusia sebagai pemasok energi Jepang karena Jepang bergantung kepada impor minyak mentah dari Sakhalin-1 dan gas alam cair (LNG) dari Sakhalin-2 Rusia untuk sebagian besar energinya. Namun Perdana Menteri Kishida berusaha untuk mengurangi ketergantungan energi pada

Rusia dan melakukan diversifikasi sumber energinya (Riise 2022). Kemudian di sisi lain dari tekanan internasional yang mana Jepang yang tergabung di dalam G7 dan juga sebagai sekutu Amerika Serikat, menjadi negara asia pertama turut serta memberikan sanksi tegas terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Jepang mengatakan bahwa perbuatan Presiden Putin mengguncang pondasi tatanan internasional dan Jepang tidak mentoleransi perubahan sepihak terhadap status quo dengan kekerasan atas perbuatan Rusia (Power 2023).

Terjadi perubahan signifikan terlihat pada pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida dengan masa Perdana Menteri Shinzo Abe dalam merespon konflik Rusia dan Ukraina. Saat konflik Rusia dan Ukraina aneksasi Krimea tahun 2014 dan pada saat itu pemerintahan Jepang masih dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, sanksi Jepang terhadap Rusia dibuat dengan sangat hati-hati untuk menjaga hubungan bilateral dengan Rusia dan dengan tetap menjaga keseimbangan Jepang dengan Amerika Serikat serta negara barat. Jepang menghindari sanksi ekonomi dengan memilih menjatuhkan sanksi simbolis. Sanksi yang dikeluarkan seperti menanggukkan diskusi mengenai peringanan persyaratan visa dan menanggukkan pembicaraan negosiasi investasi, kerja sama antariksa, dan menanggukkan diskusi militer. Selanjutnya larangan penerbitan visa untuk membatasi akses individu ke negara Jepang, dan pembekuan aset di Jepang milik individu dan organisasi yang terbatas hanya pada orang-orang yang terlibat di Krimea dan kelompok separatis di Ukraina Timur. Kemudian embargo senjata, pembatasan penerbitan surat berharga oleh bank dan pembatasan penyediaan layanan yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga (Kitade 2016).

Sanksi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Abe tidak merusak pendekatan baru yang sedang dijalankan oleh Jepang, Perdana Menteri Abe ingin membuka perdagangan baru dan bisnis baru dengan Rusia dan tampaknya menghasilkan beberapa hasil yaitu mengenai peningkatan kerja sama yang komprehensif terhadap kedua negara di bidang ekonomi dan energi serta membahas isu terkait penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril akan menjadi agenda utamanya seiring berjalannya negosiasi dengan Rusia (Kireeva 2019).

Selanjutnya di masa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi kembali untuk yang kedua kalinya pada tahun 2022. Tentunya Perdana Menteri Kishida yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang bekerja sama dengan para pemimpin G7 memberi dukungan terhadap Ukraina dan bersatu melawan invasi Rusia ke Ukraina. Kali ini Jepang mengambil langkah melakukan sanksi yang jauh lebih luas dan lebih tegas terhadap Rusia. Seperti sanksi penangguhan visa ke Jepang bagi individu atau organisasi yang terkait dengan Rusia dan individu dari kota Donetsk dan Luhansk yang ada di Ukraina. Kemudian pembekuan aset bank Rusia yang berada di Jepang yaitu Sberbank, Alfa-Bank, VTB Bank, Sovcombank, Novicom Bank, Bank Otkritie, Promsvyazbank, VEB RF, Bank Rossiya, Credit Bank of Moscow, Russian Agricultural Bank, dan Rosbank. Pembekuan aset terhadap individu, pejabat tinggi Rusia dan juga oligarki untuk bertujuan memberikan tekanan langsung kepada elit Rusia yang mendukung invasi Rusia dan ikut dalam upaya mengisolasi Rusia dari sistem keuangan internasional dan ekonomi global yaitu SWIFT, melarang pembiayaan ke Rusia dari keuangan multilateral, melarang investasi baru di Rusia dan menyediakan

layanan tertentu ke Rusia, membatasi transaksi dengan Bank Sentral Rusia (Prime Minister's Office of Japan 2023).

Kemudian larangan ekspor ke Rusia seperti larangan ekspor barang berteknologi tinggi dan peralatan canggih seperti semikonduktor yang dapat memfasilitasi untuk keperluan militer, barang terkait senjata kimia dan biologi, peralatan untuk penyulingan minyak bumi, larangan ekspor barang mewah, larangan ekspor barang yang dapat memfasilitasi penguatan basis industri Rusia. Lalu melarang impor dari Rusia seperti menghentikan impor batu bara dan minyak dari Rusia agar tidak bergantung kepada Rusia dalam sektor Energi (Prime Minister's Office of Japan 2023). Jepang juga mencabut status perdagangan “negara paling disukai” Rusia sebagai bagian dari sanksi terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Pencabutan status perdagangan tersebut akan dikenakan tarif yang lebih tinggi untuk produk-produk Rusia yang memungkinkan Jepang mengenakan Bea Cukai lebih tinggi pada produk-produk Rusia (Yamaguchi 2022a).

Sanksi-sanksi Jepang yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kishida tersebut membuat hubungan Jepang dengan Rusia kembali memburuk. Pasalnya hubungan yang terjalin antara Jepang dan Rusia bukanlah sebuah hubungan yang baik melainkan sebuah hubungan yang penuh dengan konflik yang sudah terjadi sangat lama akibat sengketa kepulauan Kuril. Jepang berusaha memperbaiki hubungan dengan Rusia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Abe di mana berusaha keras untuk menandatangani perjanjian damai dengan Rusia dan juga Jepang memandang Rusia sebagai mitra strategis di kawasan baik secara ekonomi maupun geopolitik (Shagina 2018).

Dengan demikian terlihat perbedaan pendekatan Jepang antara masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Perdana Menteri Fumio Kishida dalam menanggapi konflik Rusia dengan Ukraina. Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan kebijakan Jepang terhadap Rusia di masa Perdana Menteri Fumio Kishida, dengan menggunakan teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa yang membuat Perdana Menteri Fumio Kishida mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia pada tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jepang di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis alasan Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada tahun 2022, khususnya dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina.
2. Untuk menganalisis pengaruh konteks internasional terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Jepang dalam menerapkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada tahun 2022.
3. Untuk menganalisis sejauh mana kekuatan ekonomi dan militer Jepang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada tahun 2022.

4. Untuk menganalisis pengaruh politik domestik terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Jepang dalam penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada tahun 2022.

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian kali ini cakupan penelitian digunakan untuk menjelaskan batasan waktu, tempat, ataupun topik dari studi kasus yang akan diteliti. Sehingga fokus pada penelitian ini menganalisis kebijakan sanksi ekonomi Jepang terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina di masa Perdana Menteri Fumio Kishida. Penulis membatasi penelitian pada tahun 2022, karena tahun 2022 merupakan awal tahun invasi Rusia ke Ukraina yang membuat negara-negara G7 termasuk juga Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi untuk Rusia. Penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya kebijakan sanksi ekonomi di tahun 2022.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengambil beberapa literatur dari penelitian sebelumnya yang mana berguna sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini. Diharapkan dengan adanya beberapa rujukan mampu melengkapi penelitian ini serta sebagai referensi penulis.

Pertama, jurnal yang dituliskan oleh James D.J. Brown, jurnal ini membahas tentang hubungan awal Jepang dengan Rusia di masa pemerintahan Perdana Menteri Abe, selama di masa Abe berupaya untuk memperbaiki hubungan Jepang dengan Rusia yang telah lama rusak akibat masalah teritorial yang sudah berlangsung lama di kepulauan Kuril dan berusaha untuk menyelesaikannya. Selain itu dalam jurnal ini juga membahas minat Jepang yang kuat dalam meningkatkan

hubungan dengan Rusia untuk berhati-hati dan menentang unsur yang tidak disukai Rusia dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kemudian dalam jurnal ini juga membahas alasan Jepang memperbaiki hubungan dengan Rusia karena kepentingan ekonomi Jepang melihat bahwa Rusia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kemudian kepentingan keamanan karena terdapat perubahan dalam keseimbangan kekuatan regional akibat pengaruh Tiongkok yang semakin mendominasi di wilayah Asia Timur, hal tersebut mendorong Jepang dan Rusia untuk meningkatkan kerja sama mengatasi ancaman yang semakin besar (J. D. J. Brown 2014).

Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang kebijakan luar negeri Jepang terhadap Rusia. Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh James D.J. Brown dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jurnal ini hanya berfokus pada kebijakan luar negeri Jepang terhadap Rusia untuk memulai kembali hubungan bilateral Jepang dan Rusia di masa Pemerintahan Perdana Menteri Abe, pendekatan yang dilakukan Abe dalam hubungan dengan Rusia lebih hati-hati menekankan kepada dialog diplomasi dengan Rusia. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengapa Jepang dibawah Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida hubungan bilateral dengan Rusia kembali rusak dan mengambil langkah mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia.

Kedua, jurnal yang dituliskan oleh Maria Shagina, jurnal ini membahas tentang dilema Jepang dalam membuat kebijakan sanksi terhadap Rusia pada tahun 2014 setelah konflik Rusia menganeksasi Krimea. Jepang dihadapkan pada pilihan untuk mendukung masyarakat internasional dan mengikuti sanksi barat atau melanjutkan kepentingan nasional Jepang untuk dapat menyelesaikan sengketa

wilayah. Dalam jurnal tersebut membahas konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi di tengah upaya Perdana Menteri Abe dalam menghidupkan kembali hubungan dengan Rusia, Jepang memilih pendekatan simbolis dalam mengeluarkan kebijakan sanksi, menghindari sanksi ekonomi yang berat untuk konflik Rusia di Ukraina agar dapat menyeimbangkan dengan kepentingan nasional Jepang (Shagina 2018).

Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang kebijakan luar negeri Jepang terhadap invasi Rusia yaitu kebijakan sanksi. Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Maria Shagina dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jurnal ini hanya berfokus pada kebijakan luar negeri Jepang pada masa Pemerintah Perdana Menteri Abe mengeluarkan sanksi kepada Rusia menghindari sanksi ekonomi yang berat untuk konflik Rusia di Ukraina dan memilih mengeluarkan kebijakan sanksi simbolis untuk Rusia demi membuat hubungan kepentingan nasional Jepang dengan Rusia tetap berjalan. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengapa Jepang dibawah Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida hubungan bilateral dengan Rusia kembali rusak dan mengambil langkah mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia atas konflik yang terjadi kembali di Ukraina.

Ketiga, jurnal yang dituliskan oleh Paulus O'Shea dan Sebastian Maslow, jurnal ini membahas tentang Jepang dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Jepang memberikan tanggapan yang lebih tegas dibandingkan tanggapan pada tahun 2014 pada saat konflik Rusia di Krimea. Konflik invasi Rusia di Ukraina tahun 2022 dianggap sebagai peristiwa penting yang mempengaruhi kebijakan keamanan negara Jepang. Invasi Rusia ke Ukraina berdampak terhadap

kawasan di Asia Timur, Jepang memandang bahwa invasi ini sebagai ancaman tidak langsung di kawasan, karena tindakan Rusia ini dapat memberikan pengaruh buruk untuk negara-negara yang memiliki masalah teritorial seperti Tiongkok yang semakin aktif di Laut Cina Timur. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan konflik ini semakin memperkuat aliansi Jepang dengan sekutunya Amerika Serikat dan negara G7 lainnya untuk menghadapi masalah geopolitik global dengan memulai mereformasi kebijakan dalam peningkatan pertahanan dan juga keamanan yang lebih tegas serta meningkatkan hubungannya dengan NATO (O'Shea and Maslow 2024).

Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang kebijakan luar negeri Jepang terhadap invasi Rusia. Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Paulus O'Shea dan Sebastian Maslow dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jurnal ini berfokus pada konflik invasi Rusia ke Ukraina mempengaruhi kebijakan keamanan Jepang, sehingga membuat perubahan terhadap kebijakan keamanan Jepang dengan melakukan peningkatan pertahanan dan keamanan serta meningkatkan aliansi dengan Amerika Serikat dan negara G7. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis dari sektor lain yang terpengaruh yaitu dari konteks internasional, kapabilitas ekonomi dan militer, politik domestik. Sehingga sektor tersebut yang mempengaruhi Jepang dalam proses pengambilan keputusan mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat untuk Rusia dalam konflik dengan Ukraina.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini untuk menganalisis dan juga menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan *Decision Making Theory* atau Teori Pengambilan Keputusan dari William D. Coplin. Di dalam bukunya tersebut yang berjudul *Introduction to International Politics; A theoretical overview*. Hal yang melatarbelakangi penulis menggunakan teori ini dikarenakan penulis akan menganalisis Mengapa Jepang di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada tahun 2022? penulis menduga bahwasannya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan Jepang terhadap Rusia di masa Perdana Menteri Fumio Kishida, terdapat perbedaan pendekatan Jepang antara masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Perdana Menteri Fumio Kishida dalam menanggapi konflik Rusia dengan Ukraina.

Coplin menjelaskan dalam bukunya tersebut dalam pengambilan keputusan terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya. Pertama, adalah kondisi politik domestik suatu negara atau *Domestic Politics*. Kedua, adalah kapabilitas ekonomi dan militer atau *Economy and Military Capability*. Dan yang ketiga, adalah konteks internasional atau *International Context* (Coplin 1971) .

1. Politik Domestik atau *Domestic Politics* dari suatu negara

Coplin berpendapat di dalam bukunya bahwa untuk menentukan cara kerja politik luar negeri yang mana dapat dilihat oleh situasi di dalam negeri suatu negara, kondisi dalam negeri suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri. Dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari aktor-aktor politik dalam negeri. Aktor-aktor politik dalam negeri

berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Sehingga hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri dengan para pengambil keputusan politik luar negeri disebut sebagai *Policy Influencer* atau pemberi pengaruh kebijakan.

Ada 4 peran politik dalam negeri dalam penyusunan politik luar negeri dengan membedakan empat tipe *Policy Influencer* yaitu yang Pertama, *Partisan Influencer* atau partai politik yang pemberi pengaruh. Kedua, *Bureaucratic Influencer* atau birokrasi pemerintahan yang pemberi pengaruh. Ketiga, *Interest Influencer* atau pemberi pengaruh dari individu yang memiliki kepentingan yang sama. Keempat, *Mass Influencer* atau publik yang pemberi pengaruh.

Dalam hal ini walaupun aktor-aktor politik dalam negeri tersebut memiliki pengaruh dalam mengambil kebijakan, namun yang bertanggung jawab membuat keputusan untuk bertindak adalah seorang pemimpin negara seperti Presiden, Perdana Menteri, ataupun Raja yang mana seorang pemimpin negara tersebut mereka dapat membuat keputusan, mengatur strategi untuk memainkan konsep membuat keputusan, dan bahkan mengevaluasi keputusan atau membatalkan kebijakan yang sudah dijalankan.

2. Kapabilitas ekonomi dan militer atau *Economy and Military Capability* dari suatu negara.

Coplin dalam bukunya menjelaskan bahwa pengambilan keputusan politik luar negeri harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer dan juga kelemahan negaranya ketika menyusun politik luar negeri. Faktor kapabilitas ekonomi dan militer dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan

politik luar negeri, dapat berpengaruh dalam proses perumusan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut.

Kekuatan dan kelemahan ekonomi dapat dilihat dari PDB perkapita negara rendah atau tinggi, ekonomi bergantung kepada pada negara lain atau dapat produksi industri yang bervariasi, dan kesulitan dalam neraca pembayaran karena kurang ekspor untuk menutupi permintaan konsumen dan investasi atau sangat terlibat dalam perdagangan dunia.

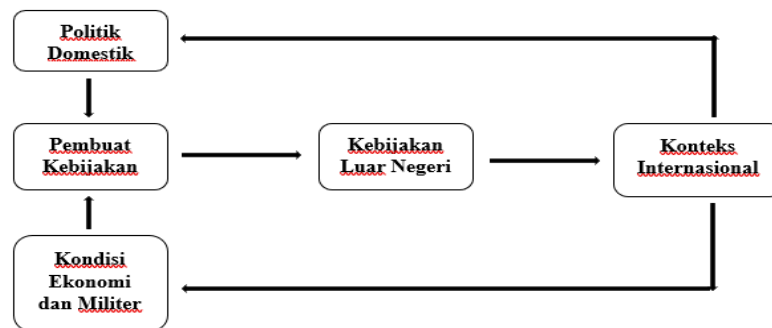
Kemudian kekuatan dan kelemahan militer dapat dilihat dari angkatan bersenjata konvensional yang terlatih dengan baik dan dapat digunakan untuk memelihara stabilitas dalam negeri atau angkatan bersenjata konvensional yang tidak terlatih dengan baik dan bergantung dalam dukungan luar negeri yang tujuannya untuk menjaga stabilitas dalam negeri.

Dalam mengimplementasikan teori ini penulis mencoba memahami kondisi ekonomi dan militer Jepang, bagaimana kapabilitas perekonomian dan militer Jepang mempengaruhi Perdana Menteri Fumio Kishida dalam mengambil keputusan politik luar negerinya.

3. Konteks Internasional

Coplin dalam teorinya menjelaskan bahwa konteks internasional dapat sebagai satu faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri negara-negara. Coplin membaginya dalam tiga elemen yaitu geografis, ekonomi, dan politik. Geografis di sini memainkan peran politik luar negeri yang penting, bagaimana kedekatan geografis akan memunculkan hubungan antar negara, menciptakan hubungan perdagangan antarnegara, perilaku pemberian suara di PBB dan keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antarpemerintah.

Ekonomi juga merupakan bagian dalam konteks internasional menjelaskan bahwa baik arus barang dan jasa maupun arus modal, membuat negara-negara tertentu bergantung pada negara lain, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan politik luar negeri suatu negara. Terakhir adalah politik menurut Coplin di mana hubungan dengan negara lain dalam lingkungan kawasan sangat berperan dalam keputusan politik luar negeri suatu negara. Aliansi bisa berdampak besar terhadap anggota dan bukan anggotanya.



Gambar 1.1 Teori Pengambilan Keputusan dari William D. Coplin
 Sumber: (Coplin 1971, 27)

1.7 Argumen Sementara

Perdana Menteri Fumio Kishida mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada tahun 2022 karena tiga faktor yang mempengaruhi, yang **pertama** faktor konteks internasional dalam konteks internasional terdapat tiga unsur yaitu geografis, ekonomi, dan politik. Secara geografis kedekatan geografis antara Jepang dengan Rusia mengancam keamanan negara Jepang, karena terjadi ketegangan di kawasan Indo-Pasifik setelah konflik Rusia di Ukraina. Secara ekonomi, Jepang sebagai bagian dari ekonomi global tetap mendukung sanksi ekonomi untuk Rusia meskipun Jepang memiliki kepentingan dalam energi Rusia, Jepang dapat melakukan diversifikasi energi. Secara politik, Aliansi yang terjalin

antara Jepang dengan Amerika Serikat mendukung Jepang dalam mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia. **Kedua** faktor kapabilitas ekonomi dan militer dari Jepang, untuk kapabilitas militer Jepang tidak memiliki militer yang kuat seperti Rusia dan tentunya militer Jepang bergantung kepada aliansi pertahanan tetapi Jepang memiliki kapabilitas ekonomi Jepang yang lebih maju dari Rusia dan kerja sama ekonomi internasional yang dijalankan Jepang dengan banyak negara hal ini memperkuat Jepang untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia. **Ketiga** faktor politik domestik, terdapat aktor dari dalam negeri untuk memutuskan mengeluarkan kebijakan yaitu *Partisan Influencer* yaitu peran dari Partai Liberal Demokrat mendukung Perdana Menteri Kishida untuk mengeluarkan sanksi terhadap Rusia. *Bureaucratic Influencer* yaitu peran dari Kementerian Luar Negeri Jepang menjadi koordinasi dengan negara-negara diluar. *Interest Influencer* peran dari kelompok kepentingan yaitu perusahaan energi Jepang, memiliki kepentingan di Rusia dan Jepang dapat memberlakukan sanksi tanpa merugikan perekonomian domestik. *Mass Influencer* yaitu peran publik, masyarakat Jepang mendukung Jepang mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang penelitiannya tidak berbasis analisis statistik atau angka melainkan mengacu kepada makna, konsep, kata-kata, definisi, analisis, deskripsi, dan interpretasi data. Biasanya penelitian kualitatif familiar dengan hubungan

masalah sosial yang digunakan untuk menjawab sebuah rumusan masalah dalam penelitian (Creswell 2009).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat subjek dan objek dalam penelitian. Subjek dari penelitian yaitu pihak-pihak atau orang yang diamati sebagai sasaran penelitian yang mana dapat dibedakan dalam tiga level yaitu mikro seperti individu (presiden atau tokoh), meso (komunitas, etnis, negara), atau makro (sistem, organisasi internasional, global governance, dan sebagainya). Sehingga dalam penelitian ini, untuk subjek penelitiannya adalah dalam level mikro yaitu negara Jepang. Selain subjek terdapat objek penelitian yaitu sesuatu hal yang hendak di analisis dari subjek penelitian tersebut. Dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Rusia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data didapatkan dari data-data sekunder yang mana data yang didapatkan didapatkan tidak secara langsung melainkan dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, data, serta berita-berita yang dikeluarkan berkaitan dengan penelitian terhadap isu yang dibawa di rumusan masalah.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti diantaranya dimulai dengan:

1. Sebelum melakukan analisis, peneliti melakukan persiapan riset yaitu peneliti membaca-baca berita, laporan dan jurnal jurnal yang ada terkait tema yang ingin dibahas.

2. Kemudian peneliti mengumpulkan dan mengolah data-data yang didapatkan bersumber dari jurnal, buku-buku, artikel, berita-berita yang terkait dengan tema yang dibahas dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk penelitian.
3. Dan yang terakhir peneliti mulai melakukan analisis dari data yang telah diperoleh. Dan tahap analisis ini yang paling penting untuk menjawab rumusan masalah dan membuat hasil kesimpulan dari penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.

Pada Bab II, berisi analisis tentang aplikasi teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin faktor konteks internasional, di dalam konteks internasional terdapat unsur geografis, ekonomi dan politik.

Pada Bab III, berisi analisis tentang aplikasi teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin faktor kapabilitas ekonomi dan militer.

Pada Bab IV, berisi analisis tentang aplikasi teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin faktor politik domestik, yang berisi empat aktor politik dalam negeri, yaitu *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*.

Pada Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB 2

KONTEKS INTERNASIONAL

Konteks internasional adalah variabel pertama yang akan dibahas untuk menjawab rumusan masalah. Coplin menjadikan konteks internasional sebagai satu dari tiga faktor yang akan menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional merupakan suatu di mana terjadi peristiwa atau dinamika di tingkat internasional yang mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam konteks internasional Coplin membaginya dalam tiga unsur yaitu, geografis, ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara (Coplin 1971, 140-142). Maka dari itu kedekatan geografis menjadi unsur pertama yang akan digunakan untuk menjelaskan konteks internasional suatu negara.

2.1. Geografis

Unsur Geografis dalam konteks internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri negara, bagaimana kedekatan geografis akan memunculkan hubungan antar negara, hal ini mempengaruhi sikap negara dalam mengambil kebijakan luar negeri negara (Coplin 1971, 142). Kedekatan geografis yang terjalin dapat menjadi ancaman atau peluang bagi negara tergantung pada bagaimana negara-negara berinteraksi. Negara yang berdekatan dapat memberikan peluang terjadinya konflik, konflik yang rentan terjadi karena negara bertetangga yaitu memiliki masalah teritorial ini merupakan sumber konflik yang jika tidak ditangani dengan benar memiliki kemungkinan lebih besar untuk berakhir dengan perang (Vasquez 1995). Namun kedekatan juga dapat memberikan peluang untuk mempererat kerja

sama seperti kerja sama perdagangan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kedekatan negara jika negara bertetangga mampu memanfaatkan hubungan dengan baik (Robst, Polachek, and Chang 2007). Maka dari ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor dari kedekatan geografis, bagaimana pola dari hubungan Jepang secara internasional mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

2.1.1. Letak Strategis Jepang di Asia Timur

Jepang merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Timur memiliki letak geografis yang strategis, terdapat empat pulau besar yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta pulau-pulau kecil lainnya. Wilayah Jepang juga dikelilingi oleh lautan yaitu Samudra Pasifik, Laut Okhotsk, Laut Jepang dan Laut Cina Timur, laut tersebut memainkan peran penting dalam banyak aspek dalam kehidupan di Jepang (Fujikura et al. 2010).

Letak geografis strategis Jepang didominasi oleh laut, membuat Jepang bergantung pada jalur komunikasi laut (SLOC) yang bebas dan tanpa hambatan karena berfungsi sebagai jalur maritim antar pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan, logistik dan aktivitas angkatan laut. Jalur komunikasi laut (SLOC) membentang dari Jepang menuju Laut China Timur melewati Selat Taiwan lalu ke Laut China Selatan melewati Selat Malaka lalu melewati Samudra Hindia hingga berakhir di Teluk Persia (Rimland 2017). Oleh karena itu laut merupakan bagian dari kekuatan Jepang sekaligus kelemahan Jepang. Kelemahan yang Jepang dapatkan dari kedekatan geografi yaitu kedekatan dengan Rusia, Tiongkok dan Korea Utara yang mana tiga negara tersebut membawa tantangan besar bagi Jepang dalam aspek keamanan dan ekonomi di kawasan Asia Timur karena ketiga negara

tersebut semakin menunjukkan kekuatannya. Seperti konflik global invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi baru-baru ini menjadi perhatian Jepang karena dampaknya berakibat terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Konflik ini meningkatkan kekhawatiran bagi Jepang karena dapat memungkinkan terjadi konflik di wilayah sekitar Jepang, Jepang memiliki masalah teritorial dengan ketiga negara tersebut. Hal ini mendorong Jepang untuk menjaga keamanan nasionalnya serta mendukung stabilitas regional dengan menjalin kerja sama dengan sekutunya untuk memperkuat militer, keamanan dan ekonomi (Lim and Kim 2022).

2.1.2. Ancaman Aktivitas Militer Rusia di Asia Timur

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Rusia melakukan peningkatan terhadap aktivitas militernya di Kawasan Asia Timur, hal ini memberikan tekanan terhadap stabilitas kawasan dan menjadikan perhatian serius bagi Jepang. Yang mana Rusia telah memulai latihan militernya yang dilakukan tahunan dan bergantian di distrik militer Rusia, bertujuan untuk menguji kesiapan militer serta meningkatkan staf komando, menyempurnakan konsep operasional dan menilai peralatan serta teknologi militer baru (Congressional Research Service 2021). Dalam hal ini latihan militer diadakan di Distrik Militer Timur memegang kewenangan atas wilayah Timur Jauh Rusia, latihan militer tersebut dinamai dengan latihan militer Vostok 2022 berskala besar dilakukan di Timur Jauh Rusia, Laut Jepang, Laut Okhotsk dan lokasi lainnya, diselenggarakan pada tanggal 1-7 September 2022 setelah invasinya ke Ukraina. Latihan militer Vostok 2022 berskala besar ini melibatkan pasukan lebih dari 50.000 tentara dan 5.000 unit senjata termasuk dengan 140 pesawat tempur dan 60 kapal perang (Shimbun 2022b).

Tujuan dari Rusia menyelenggarakan latihan militer setelah konfliknya dengan Ukraina untuk menunjukkan bahwa Rusia tidak terisolasi meskipun adanya sanksi internasional dari negara barat akibat konfliknya dengan Ukraina dan Rusia memiliki kepercayaan kepada kekuatan militernya untuk mengadakan latihan militer berskala besar bahkan disaat Rusia terlibat di dalam perang di Ukraina (Banerjee 2022). Kemudian dalam Latihan militer Vostok 2022 berskala besar tersebut diikuti oleh pasukan dari Tiongkok yang telah mengirimkan pasukannya sebanyak 2.000 tentara dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk ikut serta dalam latihan militer dengan Rusia dan negara lainnya seperti India, Laos, Mongolia, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Algeria, Nikaragua, dan Suriah. Latihan ini merupakan kedua kalinya bagi Tiongkok ikut serta dalam latihan militer tersebut yang pertama di tahun 2018, Rusia telah melakukan latihan militer gabungan bersama Tiongkok (Shimbun 2022a).

Hubungan antara Rusia dan Tiongkok telah lama berkembang, setelah konflik Rusia menganeksasi Krimea pada tahun 2014 sehingga mendapat sanksi dari negara barat dan Amerika Serikat, Rusia semakin bergantung kepada Tiongkok. Rusia dan Tiongkok telah memperkuat hubungan bilateralnya dengan meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan dan teknologi seperti penjualan senjata Rusia ke Tiongkok, proyek teknologi bersama yaitu peningkatan transfer teknologi militer dan pengembangan teknologi bersama, pertukaran personel militer dan latihan militer bersama (Gorenburg et al. 2023). Lalu meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, sanksi barat menyebabkan kekacauan dalam ekonomi Rusia, kerja sama ini tentunya memperkuat ekonomi Rusia dalam

menghadapi sanksi karena Tiongkok satu-satunya negara industri besar yang belum menjatuhkan sanksi terhadap Rusia (Kluge 2024). Kerja sama Tiongkok dan Rusia menciptakan tekanan terhadap Jepang yang berada dekat dengan kedua negara tersebut, yang mana kedua negara tersebut telah berkonflik dengan Jepang yaitu memiliki masalah sengketa wilayah, melihat kerja sama Rusia dan Tiongkok tersebut mengancam keamanan nasional Jepang.

Kemudian Rusia telah meningkatkan sistem rudal pertahanan pantai Bastion di kawasan Timur Jauh, yaitu Paramushir di Kepulauan Kuril bagian Utara dekat dengan Kamchatka pada bulan Desember 2022. Kepulauan Kuril tersebut menjadi suatu pertikaian teritorial Jepang dengan Rusia sejak lama, Jepang telah mengklaim bagian Selatan dari Kepulauan Kuril, dengan adanya sistem rudal Bastion Rusia dapat mengancam keamanan nasional dan Jepang akan memantau aktivitas militer Rusia tersebut dengan ketat. Sistem rudal Bastion Rusia memiliki jangkauan tembakan terbang hingga 500 km, langkah tersebut digunakan Rusia untuk dapat meningkatkan pertahanan Rusia yang lebih luas di wilayah Timur Jauhnya (Reuters 2022b).

2.1.3. Sengketa Wilayah Kepulauan Kuril Selatan

Sengketa Kepulauan Kuril antara Jepang dengan Rusia sudah berlangsung cukup lama sejak akhir dari Perang Dunia II. Kepulauan Kuril terletak di bagian Utara dekat pulau Hokkaido Jepang sampai dengan ujung selatan Semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah menemukan empat pulau Wilayah Utara dekat dengan lepas pantai timur laut pulau Hokkaido yaitu Habomai, Shikotan, Kunashiri, Etorofu pada zaman Edo abad ke-16 ketika tengah menyusun di peta Jepang pada zaman Shoho (abad ke-12) kemudian berlayar ke wilayah tersebut dan sekitar abad

ke-17 mulai menempati, menangkap ikan dan berburu di Wilayah tersebut hingga telah menetapkan pos pengawasan di pulau Etorofu (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2014). Lalu Uni Soviet pada abad ke-17 hingga ke-18 telah menemukan pulau tersebut saat perjalanannya ke wilayah Timur Jauh kemudian mengklaim kepulauan tersebut sebagai bagian ekspansi wilayahnya (Kaczynski 2007).



Gambar 2.1.1 Peta Sengketa Kepulauan Kuril

Sumber: (Carnegie Endowment for International Peace 2012)

Dalam gambar di abad ke-19 tahun 1855 telah dibuat perjanjian perdagangan, navigasi, dan pembatasan antara Jepang dan Rusia yang diselesaikan dengan cara damai dan bersahabat. Jepang menetapkan batasan hingga pulau Etorofu di Utara dan Rusia menetapkan batasan Kepulauan Kuril hingga Urup di Selatan, Jepang menetapkan empat pulau yaitu Habomai, Shikotan, Kunashiri, Etorofu berada di bagian Utara Jepang sehingga Jepang menamainya Wilayah

Utara dekat dengan Hokkaido. Akan tetapi setelah Perang Dunia II tahun 1945 Jepang kalah dalam perang dan menerima Deklarasi Postdam mengumumkan kealahannya dalam perang, Uni Soviet melanggar Pakta Netralitas antara Jepang dan Uni Soviet dengan melanjutkan menyerang Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerahkan empat pulau Utaranya kepada Uni Soviet. Uni Soviet telah mengusir secara paksa penduduk Jepang di empat pulau yang ditetapkan Jepang, hingga saat ini empat pulau Utara Jepang telah diduduki oleh Uni Soviet tanpa perjanjian ataupun dasar hukum apapun. Permasalahan tersebut belum terselesaikan hingga sekarang, Jepang menentang kepemilikan pulau-pulau tersebut yang diambil oleh Uni Soviet sekarang berganti menjadi Rusia, berkat keinginan kuat dan dukungan masyarakat Jepang untuk pengembalian pulau-pulau tersebut Pemerintah Jepang terus melakukan negosiasi dengan Rusia untuk mencapai perjanjian damai penyelesaian empat pulau Utara Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2014).

Tahun 1956 Jepang dan Uni Soviet telah memulai untuk menormalisasi hubungan bilateral, kedua negara menandatangani Deklarasi Bersama Jepang dan Uni Soviet untuk menetapkan berakhirnya perang dan memulihkan hubungan diplomatik, di dalam kesepakatan tidak ada penandatanganan perjanjian damai untuk masalah pengembalian empat pulau wilayah Utara Jepang, Uni Soviet mengikuti pasal 9 Deklarasi hanya setuju mengembalikan dua dari empat pulau yang diterapkan Jepang yaitu Habomai dan Shikotan setelah pemulihan hubungan diplomatik antara Jepang dan Uni Soviet, dan Jepang tidak setuju dengan itu. Pihak Jepang memiliki tujuan untuk membuat kesepakatan pulau-pulau yang diambil oleh Uni Soviet dan membuat batas wilayah, sedangkan Uni Soviet memiliki tujuan

untuk memperoleh pengakuan Jepang atas legalitas kepemilikan Kepulauan Kuril seluruhnya (Panov 2020).

Perjanjian damai Jepang dan Rusia tidak kunjung tercapai karena ketidakstabilan politik Jepang. Hingga saat Perdana Menteri Shinzo Abe menjabat kembali, kebijakan luar negeri yang Abe keluarkan berfokus kepada memperbaiki hubungan antara Jepang dengan Rusia. Masa jabatan Abe selama delapan tahun dimulai tahun 2012 ditandai dengan pendekatan baru yang lebih aktif dan konsisten terhadap Rusia hal ini jarang dilakukan dalam sejarah politik Jepang, Abe selama masa jabatannya telah melakukan banyak pertemuan dengan Presiden Putin sebanyak 27 kali bahkan hingga mengundang Presiden Putin ke kampung halamannya (Kamata 2023). Kemudian hingga terjadi konflik Rusia di Ukraina menganeksasi Krimea tahun 2014 negara G7 memberi sanksi kepada Rusia, Jepang memilih pendekatan simbolis dalam mengeluarkan kebijakan sanksi, menghindari sanksi ekonomi yang berat untuk konflik Rusia di Ukraina agar dapat menyeimbangkan dengan kepentingan nasional Jepang menyelesaikan perjanjian damai terhadap Rusia (Shagina 2018).

Selain itu Perdana Menteri Abe telah mempromosikan kerja sama ekonomi dengan Rusia dengan menyampaikan rencana kerja sama delapan point yaitu (1) kerja sama kesehatan untuk memperpanjang harapan hidup sehat, (2) mengembangkan infrastruktur kota yang nyaman dan bersih agar nyaman untuk ditinggali, (3) kerja sama energi, (4) memperluas pertukaran dan kerja sama perusahaan menengah dan kecil, (5) mendorong diversifikasi industri dan peningkatan produktivitas di Rusia, (6) kerja sama dalam pengembangan teknologi, (7) mengembangkan industri dan ekspor di Timur Jauh, (8) mengembangkan

interaksi antar masyarakat. Presiden Putin sangat mendukung dan memuji kerja sama tersebut (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2016).

Dalam usaha Jepang melakukan pendekatan baru terhadap Rusia pada akhirnya tidak berjalan lancar, penandatanganan perjanjian damai Jepang dengan Rusia tidak tercapai kembali karena Rusia tidak menunjukkan indikasi serius untuk menyerahkan empat pulau Wilayah Utara ke Jepang, usulan Presiden Putin hanya menandatangani perjanjian damai tetapi tanpa menyelesaikan masalah teritorial. Rusia tetap mempertahankan Wilayah Utara karena pulau-pulau tersebut memiliki nilai yang strategis yaitu terdapat sumber daya laut yang melimpah dan geopolitik bagus bagi militer Rusia. Oleh karena itu pendekatan baru Abe membangun hubungan personal dan kerja sama ekonomi dalam menyelesaikan masalah teritorial tidak cukup efektif dalam menyelesaikan masalah teritorial karena banyak faktor lainnya yang harus diperhatikan. Hingga akhirnya Perdana Menteri Abe mengundurkan diri jabatannya tahun 2020 karena masalah kesehatannya yang memburuk dan digantikan oleh Kepala Sekretaris Kabinetnya Yoshihide Suga tetapi tidak bertahan lama (Iwashita 2020).

Perdana Menteri Fumio Kishida kemudian melanjutkan untuk menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 2021, diplomasi dan kerja sama ekonomi yang dibuat oleh Abe untuk Rusia tidak membuahkan hasil untuk masalah Wilayah Utara dan perjanjian damai dengan Rusia dan Kishida menolak untuk melanjutkan kerja sama ekonomi tersebut karena perlu adanya evaluasi kembali. Tidak disangka pada tahun 2022 terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, Rusia kembali melakukan serangan ke Ukraina. Jepang merasa terancam keamanannya akibat Invasi Rusia ke Ukraina karena tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Perdana Menteri

Kishida mempertegas kebijakannya untuk mendukung negara-negara barat dalam memberikan sanksi berat kepada Rusia tanpa perlu menjaga hubungan bilateral yang telah gagal dengan Rusia. Situasi geopolitik global yang bermasalah mempertegas ketidakmungkinan untuk mencapai penyelesaian perjanjian damai dengan Rusia dan menjalankan kerja sama kembali, Kishida memilih untuk memprioritaskan dan fokus kepada keamanan nasional negara Jepang dan memperkuat aliansi nya dengan negara-negara G7 (TASS 2022).

Ukraina secara tidak langsung memiliki sejarah dengan Kepulauan Kuril, dalam sejarahnya ketika Ukraina yang masih bergabung kedalam Uni Soviet setelah Uni Soviet menduduki Kepulauan Kuril pemerintah Uni Soviet memindahkan secara paksa penduduk dari berbagai wilayah di Uni Soviet ke Kepulauan Kuril, sekitar 60% penduduk di Kepulauan Kuril adalah warga Ukraina yang dipindahkan secara paksa (Goble 2018). Menurut Profesor Yoshihiko Okabe dari Universitas Kobe Gakuin dalam konferensi internasional di Ukraina menyatakan: “Ukraina hidup lebih miskin daripada orang Jepang saat di bawah pendudukan Soviet, mereka bahkan tidak punya pakaian, kisah tragis ini hampir tidak diketahui secara luas di Ukraina” Okabe juga meminta masyarakat Ukraina untuk tidak boleh menyebut teritorial utara sebagai Kepulauan Kuril tetapi dengan Wilayah Utara Jepang yang mana akan mampu menarik perhatian dunia fakta bahwa Rusia menduduki wilayah Jepang secara ilegal (Centre for Russian Studies 2018).

Maka dari itu setelah Rusia menginvasi Ukraina, Ukraina juga telah mendukung Jepang dalam sengketa Kepulauan Kuril sebagai wilayah Jepang yang diduduki secara ilegal oleh Rusia, Presiden Ukraina Zelensky menandatangani dekrit yang mengakui bahwa Rusia menduduki sebagian Wilayah Utara Jepang

dengan ilegal (Sugiyama 2022). Sengketa Kepulauan Kuril bukan alasan Jepang melawan Rusia melainkan memperburuk hubungan Jepang dan Rusia, sengketa ini sebagai salah satu faktor yang membuat Jepang semakin tegas terhadap Rusia setelah perang Rusia dan Ukraina, hal ini juga dipertegas oleh Profesor Yoshihiko Okabe dari Universitas Kobe Gakuin dalam Forum Ukraina-Jepang Ketiga “Kemitraan yang bertanggung jawab. Ukraina dan Jepang dalam konteks perang Rusia” menyatakan: “Pasifisme Jepang masih kuat hingga saat ini. Saya harus menyatakan bahwa kita harus menekankan kesamaan antara Jepang dan Ukraina. Kita memiliki satu masalah besar yang sama dengan Rusia. Jepang memiliki sengketa wilayah dengan Rusia” (New Europe Center 2023).

Dalam faktor konteks internasional dari kedekatan geografi menurut teori dari Coplin, penulis menganalisis bahwa mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia karena kedekatan geografis dari negara Jepang dan Rusia telah menjadi ancaman bagi Jepang, invasi Rusia ke Ukraina berpengaruh terhadap ketidakstabilan kawasan Jepang di Asia Timur karena setelah invasi, Rusia telah meningkatnya aktivitas militer Rusia di Timur Jauh Rusia, dan masuk ke kawasan Asia Timur seperti Laut Jepang, Laut Okhotsk dan lokasi lainnya kemudian Rusia menjalin kerja sama bersama dengan militer Tiongkok hal ini tentunya mempengaruhi keamanan nasional Jepang. Selain itu masalah teritorial sengketa Wilayah Utara atau Kepulauan Kuril yang masih menjadi perebutan antara kedua negara tidak kunjung terselesaikan dan makin sulit untuk mencapai penyelesaian. Sehingga hal ini memutuskan Jepang untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia memilih untuk memprioritaskan dan fokus kepada keamanan nasional negara Jepang.

2.2 Ekonomi

Unsur kedua yaitu ekonomi menurut Coplin dalam konteks internasional unsur ekonomi telah mempengaruhi kebijakan luar negeri negara, menjelaskan bagaimana arus barang, jasa maupun modal, dan ketergantungan ekonomi antar negara yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan politik luar negeri suatu negara, negara seringkali harus memperhatikan hubungan ekonomi sebelum mengambil keputusan (Coplin 1971, 143). Maka dari ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pola dari hubungan kerja sama ekonomi Jepang dengan Rusia, mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia.

2.2.1. Tekanan Ekonomi Global

Konflik invasi Rusia ke Ukraina yang telah melanggar hukum internasional menjadi penyebab terbatasnya dan bernilai kecilnya kerja sama ekonomi Jepang dan Rusia. Negara-negara barat khususnya negara yang tergabung dalam G7 termasuk juga Jepang menanggapi masalah invasi Rusia ke Ukraina dengan menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat untuk Rusia. Negara-negara G7 mulai menjatuhkan banyak sanksi ekonomi untuk Rusia, tujuan dijatuhkannya sanksi untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap Rusia agar mengubah perilaku atau kebijakan yang melanggar hukum internasional atau hak asasi manusia (Bubnova 2022). Sanksi tersebut telah menandai titik kritis yang tidak bisa ditoleransi, peran Jepang dalam mendukung sanksi internasional terhadap Rusia sebagai ikut menjaga stabilitas tatanan internasional dan menjaga kredibilitasnya di mata komunitas internasional sebagai negara demokratis (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2023).

2.2.2. Kedekatan Hubungan Jepang dan Rusia

Hubungan antara Jepang dengan Rusia terjalin tidak begitu dekat, lebih didasarkan pada kepentingan energi daripada hubungan diplomatik yang erat. Ketidakstabilan geopolitik akibat konflik dan masalah teritorial yang tidak kunjung terselesaikan antara Jepang dan Rusia membuat kedekatan kedua negara tidak mendalam. Jepang telah berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan melakukan kerja sama ekonomi dengan Rusia tetapi peningkatannya relatif kecil. Pasalnya kedua negara dapat berpotensi sangat besar dalam kerja sama ekonomi karena memiliki perekonomian yang saling melengkapi, Jepang membutuhkan sumber daya alam dari Rusia karena Rusia memiliki sumber daya alam yang kaya dan Rusia membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi dan ekonomi yang maju (Li 2021).

Jepang telah menjalin perdagangan bersama Rusia, Jepang banyak mengekspor barang ke Rusia yaitu kendaraan seperti mobil, motor, kendaraan konstruksi besar beserta komponennya, kemudian mesin-mesin dan peralatan mekanik, peralatan medis dan lainnya, dengan nilai sebesar \$4,639 juta pada tahun 2022 (International Trade Centre 2023a). Jepang juga telah banyak impor minyak mentah, gas alam, briket batubara, aluminium, produk hewani, berlian, dan lainnya, dengan nilai sebesar \$14,997 juta pada tahun 2022 (International Trade Centre 2023b). Nilai tersebut cukup kecil jika dibandingkan dengan mitra lainnya yang mendominasi pasar Jepang dan juga total ekspor dan impor Jepang.

Selanjutnya, menurut Bank Data Teikoku sebanyak 347 perusahaan-perusahaan Jepang yang telah berada di Rusia, jumlah perusahaan terbesar di Rusia yaitu perusahaan manufaktur sebanyak 156 perusahaan seperti produsen mobil dan

motor, produsen suku cadang. Industri tersebut paling menarik untuk penanaman modal asing Jepang di Rusia selain minyak dan gas di proyek Sakhalin yaitu otomotif dan manufaktur, namun jumlah perusahaan Jepang yang beroperasi di Rusia jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya sampai dengan 1.000 perusahaan (Bank Data Teikoku 2022). Perusahaan Jepang terdapat kendala besar dalam berbisnis di Rusia selain karena kondisi geopolitik yang tidak stabil juga karena terdapat prosedur otorisasi dan persyaratan dokumen yang rumit, prosedur yang tidak transparan dan masalah terkait sistem hukum, masalah di dalam negeri tersebut membuat perusahaan Jepang tidak menarik untuk berbisnis di Rusia (Brown 2019).

Jepang dan Rusia juga telah menjalin kerja sama ekonomi pada sektor pariwisata, berdasarkan data yang tersedia jumlah wisatawan antara Jepang dan Rusia relatif kecil dibandingkan dengan total kunjungan wisatawan lainnya di masing-masing negara. Menurut statistik pariwisata Jepang, wisatawan Rusia yang mengunjungi ke Jepang sekitar 10,324 orang pada tahun 2022 dan terbanyak sekitar 120,043 orang pada tahun 2019. Kedua negara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama di sektor pariwisata seperti mempermudah prosedur visa bagi wisatawan kedua negara, mengadakan acara festival budaya dan wisata untuk meningkatkan daya tarik pariwisata serta mengembangkan wilayah yang memiliki potensi wisata tinggi (JNTO 2024). Meskipun terdapat hubungan pariwisata antara Jepang dengan Rusia, jumlah wisatawan berkunjung relatif kecil. Dalam hal ini kerja sama antara Jepang dan Rusia tetap terjalin meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar.

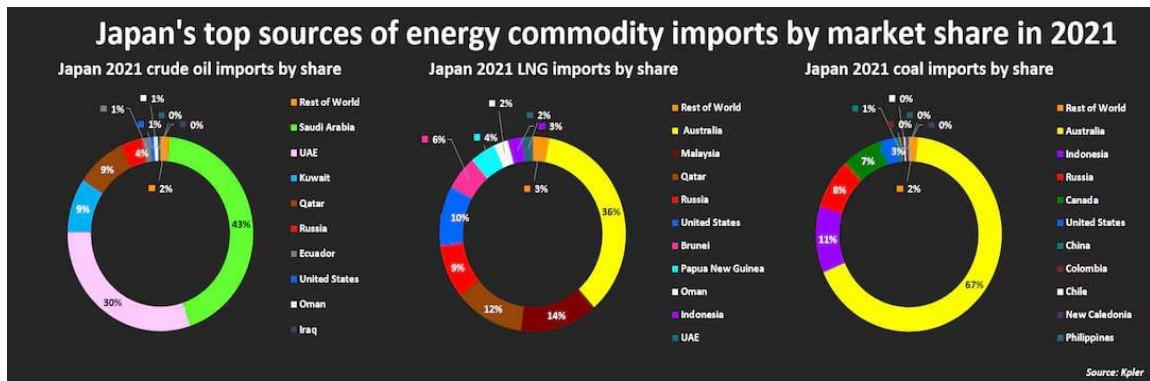
2.2.3. Ketergantungan Energi Jepang pada Rusia

Jepang negara yang kekurangan dalam sumber daya alam, sehingga sangat bergantung pada impor energi untuk hampir seluruh pasokan energinya. Bencana di Fukushima tahun 2011 yang membuat pembangkit listrik tenaga nuklir satu-satunya sumber produksi energi berskala besar yang dimiliki Jepang harus hancur setelah tsunami menghantam negara Jepang (Riise 2022). Jepang menduduki peringkat kelima dalam konsumen minyak tertinggi di dunia pada tahun 2022 hampir 97% bergantung kepada impor energi, Jepang mengandalkan pengiriman gas alam cair, minyak mentah, batu bara dengan menggunakan pengiriman melalui kapal tanker untuk memenuhi permintaan karena tidak memiliki jalur pipa minyak dan gas alam internasional (U.S. Energy Information Administration 2023).

Rusia menjadi salah satu negara impor sumber daya alam seperti minyak, batubara, gas alam untuk Jepang karena negaranya yang kaya akan sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan Jepang juga telah berinvestasi dalam proyek-proyek minyak dan gas Rusia yaitu di Sakhalin-1 dan Sakhalin-2 sebagai langkah untuk mengamankan pasokan energi yang stabil bagi Jepang. Sakhalin Oil and Gas Development Co sebuah sindikat perusahaan Jepang telah memegang saham sebesar 30% di Sakhalin-1 Timur Jauh Rusia untuk proyek minyak dan gas, Sakhalin Oil and Gas Development Co dimiliki oleh pemerintah Jepang dan perusahaan swasta yaitu Itochu Corp, Marubeni Corp, Inpex Corp dan Japan Petroleum Exploration Co (Yamaguchi 2022b). Selain itu Jepang berinvestasi dalam proyek Sakhalin-2 yaitu gas alam cair (LNG), Jepang memiliki saham di Sakhalin-2 yang berkontribusi dalam mengamankan pasokan gas alam cair,

perusahaan Jepang Mitsui & Co dan Mitsubishi Corp memiliki saham masing-masing sebesar 12,5% dan 10% di proyek Sakhalin-2 (Reuters 2022a).

Konflik invasi Rusia ke Ukraina menciptakan tantangan yang besar bagi Jepang karena harus menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat untuk Rusia, sanksi yang dijatuhkan bersama dengan komunitas internasional yaitu negara-negara G7, seperti salah satunya sanksi ekonomi melarang ekspor ke Rusia dan impor dari Rusia. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap perekonomian Jepang karena akan membuat Jepang melakukan diversifikasi sumber perdagangan. Diversifikasi ini dapat berupa peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain.



Gambar 2.2.1 Sumber Utama Impor Komoditas Energi Jepang Berdasarkan Pangsa Pasar Pada Tahun 2021

Sumber: (Reuters 2022)

Data pada tahun 2021 di dalam gambar, sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Jepang memperoleh sebagian besar kebutuhannya utamanya dari Rusia sebesar 9% untuk gas alam cair (LNG), minyak mentah 4%, batu bara 8%. Jepang sangat bergantung kepada impor energi gas alam cair (LNG) dari Rusia 9% menyumbang pasokan gas alam cair (LNG) ke Jepang (Swift and Obayashi 2022).

Figure 8. Japan's crude oil and condensate imports by source, 2022

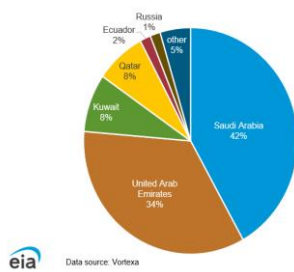


Figure 10. Japan's LNG imports by source, 2022

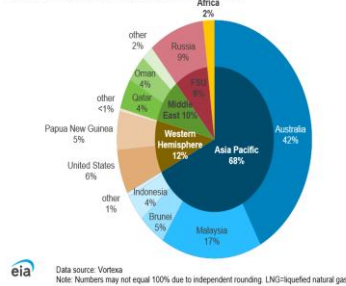
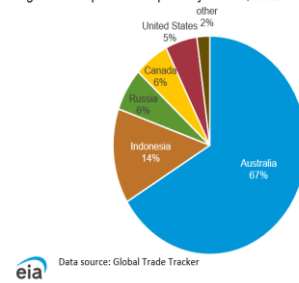


Figure 11. Japan coal imports by source, 2022



Gambar 2.2.2 Sumber Utama Impor Komoditas Energi Jepang Berdasarkan Pangsa Pasar Pada Tahun 2022

Sumber: (U.S. Energy Information Administration 2023)

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Jepang mengurangi pembelian minyak mentah ke Rusia menjadi 1%, batu bara menjadi 6% dan gas alam cair (LNG) bernilai sama yaitu 9% (U.S. Energy Information Administration 2023). Nilai gas alam cair tetap karena Jepang menjalin proyek di Sakhalin, ketergantungan Jepang pada gas alam cair (LNG) sangat besar dan jika melepas proyek di sakhalin-1 dan sakhalin-2 dapat menyebabkan Tiongkok memasuki proyek tersebut, proyek Sakhalin penting bagi Jepang dalam hal ketahanan energi dan Jepang tidak bisa langsung untuk memboikot minyak dan gas alam cair karena mencari alternatifnya dalam waktu dekat tidak mudah dan harganya dipastikan akan sangat mahal, Jepang sebagai negara dengan sumber daya yang terbatas bergantung juga kepada impor energi (Kyodo News 2022b).

Meskipun kerja sama ini penting bagi Jepang, sanksi tetap dijalankan untuk Rusia dengan mempertahankan proyek Sakhalin tetapi Jepang akan mencoba melakukan diversifikasi sumber energi ke negara lain untuk mengurangi ketergantungan energi dengan Rusia. Jepang akan meningkatkan energi terbarukan di wilayahnya dengan target mencapai 38% dan juga Jepang akan menjalin kerja

sama dengan negara lain dengan membangun proyek gas alam cair (LNG) baru di Alaska dan Kanada Barat, letak dari kedua negara tersebut jauh lebih baik dari Sakhalin dan resiko geopolitik yang lebih sedikit (Golubkova and Obayashi 2024).

Maka dari itu, dalam faktor konteks internasional dari unsur ekonomi menurut teori dari Coplin, penulis menganalisis bahwa mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia karena terdapat solidaritas Jepang ikut serta untuk menjaga kredibilitasnya sebagai pendukung tatanan global yang aman bersama dengan negara-negara G7 mendukung Ukraina di konflik Rusia dan Ukraina dengan memberikan sanksi ekonomi yang berat untuk Rusia dan juga melihat bahwa hubungan ekonomi Jepang dengan Rusia terbatas dan relatif kecil nilainya karena ketidakstabilan geopolitik dari masalah teritorial yang tidak kunjung terselesaikan antara Jepang dan Rusia, dan ketergantungan dari energi Jepang terhadap Rusia tidak menghalangi Jepang memberikan sanksi terhadap Rusia karena Jepang dapat melakukan diversifikasi sumber energi ke negara lain untuk mengurangi ketergantungan energi dengan Rusia dan juga telah mengurangi ketergantungan dengan meningkatkan energi terbarukan. Hal ini memungkinkan Jepang untuk memberikan sanksi yang tegas untuk Rusia.

2.3. Politik

Unsur yang ketiga yaitu politik, menurut Coplin hubungan politik dengan negara lain dalam lingkungan sangat berperan dalam keputusan politik luar negeri suatu negara. Aliansi dapat berdampak besar terhadap anggota dan bukan anggotanya. Aliansi merupakan salah satu komponen utama hubungan internasional, dengan aliansi dapat memelihara perdamaian dan stabilitas (Coplin 1971, 143). Maka dari ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pola dari

hubungan aliansi dengan Jepang, sehingga dapat membuat Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

2.3.1. Aliansi Jepang dengan Amerika Serikat dan Negara G7

Perang yang telah terjadi di Ukraina akibat dari invasi Rusia, telah menunjukkan betapa pentingnya jaringan aliansi untuk menjaga keamanan, memelihara perdamaian dan stabilitas. Sebelumnya Jepang telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengeluarkan tiga dokumen Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional baru negara Jepang, dikeluarkannya dokumen tersebut memperlihatkan bahwa Jepang terganggu dengan kondisi lingkungan keamanan regional dan internasional dengan banyaknya konflik seperti invasi Rusia terhadap Ukraina, konflik Tiongkok dan Taiwan serta peningkatan aktivitas militer Tiongkok dengan Rusia, Korea Utara yang semakin meningkatkan kekuatan nuklir dan uji coba peluncuran rudalnya, oleh karena itu strategi tersebut dibuat untuk mencegah meningkatnya ketegangan. Pada 16 Desember 2022 Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyetujui tiga dokumen strategi keamanan terbaru tersebut, yaitu Strategi Keamanan Nasional Jepang (NSS), Strategi Pertahanan Nasional (NDS), dan Program Peningkatan Pertahanan (DBP). Tujuan dari ketiga dokumen tersebut karena meningkatnya ketegangan dan Jepang tidak harus bersikap pasif lagi dan harus bersikap aktif dengan peningkatan pertahanan dan memberikan pengaruh dalam upaya menciptakan tatanan internasional yang damai dan stabil (Tsuneo 2023).

Dari keputusan Jepang mengeluarkan tiga dokumen Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional baru negara Jepang memiliki implikasi yang luas bagi aliansinya dengan Amerika Serikat, Reaksi Amerika terhadap putusan Jepang

sangat positif dan Presiden Biden memuji bahwa Jepang memiliki kepemimpinan yang berani dalam mengembangkan kemampuan pertahanannya, ini membuat Jepang menjadi sekutu Amerika Serikat yang semakin kuat. Pasalnya memang hubungan Jepang dengan Amerika Serikat telah terbentuk pada tahun 1951 sebagai aliansi kerja sama dan keamanan bersama antara kedua negara. Jepang menjelaskan bahwa kebijakan keamanannya tetap berlandaskan kuat dalam konteks aliansi. Ketidakseimbangan militernya dengan Tiongkok, Rusia, Korea Utara terlalu besar bagi Jepang untuk tidak melibatkan aliansi. Jepang dan juga Amerika Serikat berupaya untuk bekerja sama lebih erat dalam isu-isu lainnya juga. Selain itu perubahan tiga dokumen Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional baru negara Jepang, membuka kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara Eropa atau G7 memungkinkan untuk memperkuat kerja sama dengan negara di Eropa dan negara yang lainnya seperti latihan militer bilateral, proyek persenjataan bersama dan lainnya. Perang Rusia di Ukraina telah mengganggu tatanan keamanan internasional yaitu Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik. Jepang akan mengupayakan hubungan kerja sama yang lebih kuat dengan Eropa dalam masalah kebijakan keamanan, selain bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kerja sama keamanan yang dilakukan Jepang tidak hanya karena Jepang merupakan pemain penting di Indo-Pasifik, tetapi juga karena Jepang menunjukkan keinginan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab di tingkat global (Sakaki 2023).

Maka dari itu, dalam faktor konteks internasional dari unsur politik menurut teori dari Coplin, penulis menganalisis bahwa mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia karena terdapat peran dan dukungan dari aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat dan negara Eropa G7.

Jepang dengan Amerika Serikat dan negara Eropa G7 bekerja sama untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan, memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan internasional, khususnya di kawasan Indo-pasifik dan Eropa. Jepang sebagai bagian dari aliansi memiliki kepentingan untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan hal ini sejalan dengan prinsip diplomasi Jepang. Jepang ingin menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum internasional serta berkeinginan juga memperkuat posisinya dalam kerja sama ekonomi dan keamanan dengan negara-negara demokratis yang memiliki pandangan yang serupa dengan Jepang. Dukungan Jepang terhadap sanksi untuk Rusia mencerminkan bahwa terdapat komitmen terhadap nilai-nilai demokratis.

BAB 3

KAPABILITAS EKONOMI DAN MILITER

Setelah Bab 2 membahas konteks internasional, selanjutnya yang akan dibahas yaitu kapabilitas ekonomi dan militer menjadi faktor yang akan dibahas untuk menjawab rumusan masalah. Dalam teori Coplin, kapabilitas ekonomi dan militer menjadi faktor yang akan menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Kondisi ekonomi dan militer suatu negara dapat menjadi pengaruh untuk pengambilan keputusan (Coplin 1971, 111). Maka dari itu penulis mencoba memahami kondisi ekonomi dan militer Jepang, bagaimana kapabilitas perekonomian dan militer Jepang mempengaruhi Perdana Menteri Fumio Kishida dalam mengambil keputusan politik luar negerinya.

3.1. Kapabilitas Ekonomi Jepang Dalam Pemberian Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia

Dalam teori Coplin untuk kapabilitas ekonomi Jepang dapat dilihat dari PDB perkapita negara rendah atau tinggi, ekonomi bergantung kepada negara lain atau dapat produksi industri yang bervariasi, dan kesulitan dalam neraca pembayaran karena kurang ekspor untuk menutupi permintaan konsumen dan investasi atau sangat terlibat dalam perdagangan dunia (Coplin 1971, 112). Maka dari itu penulis mencoba menganalisis kondisi ekonomi dari negara Jepang.

3.1.1. Ekonomi Jepang

Jepang merupakan negara dengan perekonomian maju dan terbesar ketiga di dunia, menurut data dari *World Bank* Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang sebesar \$4,26 triliun dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar \$34,017

pada tahun 2022 (World Bank 2023). Sebagai negara dengan perekonomian yang maju, Jepang memiliki kekuatan industri yang besar karena terkenal dengan inovasi teknologinya, produksi berkualitas tinggi, dan tingkat ekspor besar dalam sektor manufaktur otomotif dan elektronik (Zukhra and Kamilova 2024). Arus perdagangan Jepang memiliki total ekspor sebesar \$746.672 juta dan total impor sebesar \$898.600 juta pada tahun 2022. Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi mitra ekspor dan impor Jepang paling mendominasi, kemudian ada negara Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Singapura, Taiwan. Produk teratas yang Jepang ekspor yaitu kendaraan mobil, mesin dan peralatan mekanik, peralatan elektronik (World Integrated Trade Solution 2022). Dalam hal ini karena industri dan potensi teknologi yang kuat Jepang memberikan pengaruh terhadap arus keuangan dan perdagangan global untuk maju.

3.1.2. Kerja sama dalam Organisasi Ekonomi Internasional

Selain itu, dengan kekuatan industri yang dimiliki Jepang sebagai negara dengan perekonomian maju dan tentunya tergabung ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kerja sama dalam organisasi ekonomi internasional pastinya sangat penting untuk Jepang. Seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) adalah FTA multilateral terbesar di dunia antara Jepang, Malaysia, Vietnam, Australia, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Meksiko, Peru, Chili. Ini merupakan salah satu Zona perdagangan bebas yang mencakup 13,5% dari PDB global. Perjanjian ini ditandatangani pada 8 maret 2018 dan mulai berlaku 30 desember 2018 setelah semua menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut. CPTPP mewujudkan liberalisasi tingkat tinggi, memberi negara negara yang tergabung memiliki akses

yang lebih besar ke pasar satu sama lain, menetapkan aturan perdagangan dan investasi yang lebih bebas. Peningkatan ini menciptakan peluang kerja baru dan mendorong inovasi yang mana dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan dan di dunia (Ito 2018). CPTPP telah melembagakan aturan perdagangan yang baru yaitu membuat kesepakatan perdagangan di Asia-Pasifik, ini dapat membantu Jepang dalam memperkuat dan menunjukkan peran utamanya di Asia-pasifik dalam membangun pijakan yang kuat dalam ekonomi dan diplomasi global. Oleh karena itu CPTPP akan menjadi landasan untuk Jepang membangun kekuatan ekonomi dan diplomatiknya di Asia-Pasifik (Kim 2018).

Kemudian Jepang telah bergabung juga ke dalam kerja sama regional yaitu *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) adalah perjanjian kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan. Anggota dari RCEP yaitu terdiri dari negara di ASEAN ditambah 5 negara mitra yaitu Jepang, Tiongkok, Australia, Korea Selatan dan Selandia Baru. Perjanjian RCEP ini ditandatangani oleh Jepang pada tahun 2020 dan baru dimulai tahun 2022, RCEP memberikan manfaat ekonomi bagi Asia Timur terutama bagi Jepang untuk mendorong perdagangan barang dan jasa serta investasi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Asia Timur, berkontribusi pada pembentukan aturan-aturan baru, memfasilitasi rantai pasokan di Asia Timur, mempersempit kesenjangan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Perjanjian RCEP menyumbang setengah nilai perdagangan Jepang, RCEP akan mendorong pembangunan ekonomi di Asia Timur dan seluruh dunia (Shimizu 2022).

3.2. Kapabilitas Militer Jepang dalam Pemberian Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia

Selanjutnya untuk kapabilitas militer dalam teori Coplin dapat dilihat dari angkatan bersenjata konvensional yang terlatih dengan baik dan dapat digunakan untuk memelihara stabilitas dalam negeri atau angkatan bersenjata konvensional yang tidak terlatih dengan baik dan bergantung dalam dukungan luar negeri yang tujuannya untuk menjaga stabilitas dalam negeri (Coplin 1971, 112). Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis kondisi militer dari negara Jepang.

3.2.1. Kekuatan Militer Jepang

Jepang merupakan negara yang sukses di bidang ekonomi dan teknologinya tetapi lemah di bidang militer, menurut *Global Fire Power* pada tahun 2022 militer Jepang berada dalam urutan ke 5 dari 145 negara, jauh dari urutan Rusia menempati urutan ke 2 dari 145 negara. Dalam catatan sejarah militer Jepang dahulu dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, pada Perang Dunia II Jepang cukup banyak menguasai banyak wilayah di Asia dengan ekspansi militernya yang aktif, lalu terjadi dinamika militer yang mana tahun 1945 kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom atom oleh sekutunya Amerika Serikat, sehingga menimbulkan kehancuran dan membuat Jepang menyerah pada sekutu di Perang Dunia II. Kekalahan tersebut membuat Jepang mengalami kemunduran di berbagai aspek termasuk dalam pertahanannya, Jepang diberi sanksi dilarang keras untuk mengembangkan kekuatan militernya dan hanya diperbolehkan memiliki Pasukan Bela Diri (JSDF) oleh Amerika dan dapat dipergunakan untuk pertahanan diri menghadapi ancaman regional (Marsono, D.A.R, and Asmoro 2018).

Hal tersebut tertulis dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang yang dirancang oleh Amerika Serikat tahun 1947 yaitu “Dengan tulus mendambakan perdamaian internasional yang berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan. Hak berperang negara tidak akan diakui” (Prime Minister of Japan and His Cabinet 1947).

Jepang menyerahkan pertahanannya kepada Amerika Serikat dengan melakukan perjanjian keamanan Jepang dan Amerika Serikat (*Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States of America and Japan*) tahun 1951 dan ditegaskan kembali pada tahun 1960, perjanjian ini bertujuan untuk melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan sebagai memperkuat perdamaian dan keamanan, Amerika Serikat menjadikan Jepang negara demokratis dan juga anti kekerasan, sebagai cara mencegah terjadinya kemunculan kekuatan militernya (Ministry of Foreign Affairs of Japan 1960). Selain itu dalam perjanjian, Jepang mengizinkan untuk pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang letaknya di Okinawa sebagai merealisasikan kesepakatan keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat, letak pangkalan militer Amerika di Okinawa cukup strategis karena dekat dengan Tiongkok, Taiwan dan Korea Utara (Alexandra 2015). Pangkalan militer Amerika di negara Jepang berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta melindungi Jepang ketika sewaktu-waktu Jepang di serang, berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang menjadi sebuah eksistensi pertama Amerika di kawasan Asia, memastikan kontrol atas kawasan

Asia Timur dan dapat menghentikan berbagai bentuk ancaman terhadap kepentingan Amerika di kawasan tersebut (Antuli et al. 2024).

Kemudian, perjanjian keamanan Jepang dan Amerika tersebut diperkuat dengan undang-undang keamanan Amerika Serikat 1951 (*Mutual Security Act*), yang mana ini merupakan undang-undang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dunia yang ingin mengembangkan serta menjaga kebebasan dan menjaga perdamaian. Bantuan tersebut seperti peralatan militer bagi pasukan yang ingin mempertahankan negara mereka ketika diserang, memberikan penyediaan bahan baku memproduksi senjata, tank dan pesawat untuk pertahanan, menyediakan teknisi dan peralatan medis, memberikan bantuan ekonomi dan banyak hal lainnya. Undang-undang ini berguna untuk memperkuat pertahanan keamanan bersama dengan negara-negara sekutu termasuk juga Jepang, undang-undang tersebut membuat Jepang tetap aman tanpa harus membangun kekuatan militer besar, yang mana Amerika Serikat yang akan menjadi payung pertahanannya (The American Presidency Project 1951).

3.2.2. Modernisasi militer Jepang

Dalam studi kasus yang dibahas untuk kapabilitas militer, Jepang tidak memiliki militer yang kuat seperti Rusia, tetapi Jepang tetap melakukan modernisasi militernya untuk pertahanan diri dalam menghadapi ancaman regional dengan melakukan peningkatan kapasitas pertahanannya. Di masa Pemerintahan Fumio Kishida banyak yang terjadi perubahan dalam lingkungan keamanan Jepang, Jepang dikelilingi oleh tiga negara besar yang sering dianggap mengancam geopolitik yaitu Tiongkok, Korea Utara dan Rusia mereka berusaha mengubah status quo dengan kekerasan yang mana menjadikan lingkungan keamanan Jepang

terancam. Seperti Tiongkok telah memperkuat kekuatan militernya dengan melakukan aktivitas militer di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, kemudian memperkuat ketegangannya dengan Taiwan yang kemungkinan akan menguasai Taiwan karena Tiongkok menganggap itu bagiannya dan telah mengintensifkan ancaman ini dalam beberapa tahun sebelumnya. Lalu Korea Utara sedang mengembangkan rudal balistik dan senjata nuklir bertujuan untuk mencegah intervensi militer oleh Amerika Serikat, hal ini mengganggu Jepang yang mana kemungkinan wilayah Jepang akan menjadi target serangan dan terakhir konflik dari Rusia sangat mengejutkan Jepang yaitu telah mengubah status quo dengan kekerasan pada konfliknya melakukan invasi di Ukraina tahun 2022 dan juga Rusia telah meningkatkan aktivitas militernya di wilayah perairan sekitar Jepang, serta melakukan latihan militer bersama Tiongkok (Nishida 2023).

Hal tersebut membuat Jepang untuk segera melakukan pertahanan diri dengan peningkatan kapabilitas pertahanannya yaitu peningkatan anggaran militer pertahanan dan penguatan strategi militer Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan akan menaikkan anggaran pertahanan sampai pada 2% dari PDB pada tahun 2027, yang tadinya anggaran pertahanan hanya sekitar 1% dari PDB. Anggaran pertahanan telah naik sebesar 6,82 triliun yen (sekitar \$48 miliar) untuk dimulai pada tahun 2023. Kemudian tahun 2024 anggaran pertahanan disetujui sebesar 7,95 triliun yen (sekitar \$56 miliar), dan berencana akan menaikkan hingga 43 triliun yen (sekitar \$300 miliar) pada tahun 2027. Anggaran 2024 yang dibuat tersebut digunakan untuk memperkuat pertahanan Jepang jika terjadi konflik dengan pengembangan rudal Tipe-12 dan Tomahawk buatan Amerika serta pengembangan rudal jarak jauh menghabiskan sekitar 734 miliar yen (sekitar \$5,15

miliar). Lalu Jepang juga telah menghabiskan sekitar 80 miliar yen (sekitar \$562 juta) untuk pengembangan rudal berpemandu hipersonik dengan jangkauan 3.000 km. Pemerintah Kishida juga telah mengizinkan ekspor senjata dan komponennya buatan Jepang tentunya di bawah lisensi, pelonggaran ekspor ini kemungkinan membuka jalan ekspor puluhan senjata dan komponen matikan, hal ini akan membantu memperkuat industri pertahanan Jepang yang lemah dan dapat juga memperluas bantuan militer untuk negara-negara yang memiliki pandangan yang serupa pada keamanan Indo-Pasifik (Yamaguchi 2023).

3.2.3. Aliansi Militer Jepang

Jepang telah menjalin dan meningkatkan berbagai aliansi dan kerja sama untuk memperkuat kapabilitas militernya selain aliansi dengan Amerika Serikat, yaitu Jepang telah bergabung dalam aliansi Quadrilateral Security Dialogue atau yang dikenal dengan QUAD merupakan kelompok multilateral di suatu forum dialog informal yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang. Dibentuk dari kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik membangun komitmen untuk mendukung kawasan “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” dan mempertahankan ketertiban berbasis aturan. Awal dibuat pada tahun 2004 untuk mengkoordinasi bantuan kemanusiaan setelah tsunami di Samudra Hindia, lalu pada tahun 2007 Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengambil langkah mengusulkan pengembangan respons empat negara terhadap tsunami menjadi dialog yang lebih luas berfokus kepada kerja sama regional, memperkuat keamanan maritim di wilayah dua samudra, tetapi tidak dilanjutkan karena India dan Australia goyah dalam pendirian dan kelanjutan kerja sama ini (Ba 2023).

Kemudian pada tahun 2017 QUAD dimunculkan kembali oleh Presiden Trump setelah memimpin sebagai Presiden Amerika Serikat, dan para perwakilan pejabat dari keempat negara bertemu di KTT ASEAN di Manila membahas berbagai macam masalah seperti keamanan maritim, dukungan untuk konsep “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” dan juga peningkatan sistem berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik (Smith 2020). Dimulainya kembali QUAD tidak berupaya menjadikan QUAD seperti organisasi NATO, tetapi sebagai pertahanan untuk menjaga kawasan yang bebas, terbuka, damai, tidak didominasi ideologi otoriter dan sebagai penyeimbang terhadap pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok yang semakin berkembang, serta adanya aktivitas militer dari Korea Utara dan Rusia di Indo-Pasifik (Curtis et al. 2022).

Selanjutnya di pemerintahan Joe Biden pada tahun 2021 semakin memperkuat QUAD dengan di tingkatnya forum ini ke tingkat kepemimpinan. QUAD menjalani kerja sama militer latihan angkatan laut gabungan Malabar telah berkembang di antara keempat negara QUAD, sejak Australia kembali bergabung tahun 2020 latihan Malabar telah dilakukan setiap tahun dengan partisipasi dari semua negara QUAD, kemudian sejak Presiden Biden menjabat QUAD tidak hanya berfokus kepada bidang keamanan maritim tetapi bekerja sama lebih luas dalam bidang sosial seperti produksi dan distribusi vaksin, upaya mitigasi perubahan iklim dan pengembangan energi bersih, memanfaatkan inovasi teknologi baru, pengembangan kemitraan infrastruktur yang berkualitas, membangun keamanan siber (Congressional Research Service 2023). Aliansi dengan QUAD sangat penting bagi Jepang karena untuk pertahanan diri Jepang, Jepang yang lemah akan kekuatan militer sangat membutuhkan aliansi seperti aliansi dengan QUAD

menjadi bagian penting dari strategi pertahanan Jepang, dengan QUAD Jepang dapat mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat dan memperluas jaringan keamanannya ke negara-negara lainnya.

Maka dari itu, dalam faktor kapabilitas ekonomi dan militer menurut teori dari Coplin, penulis menganalisis bahwa mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia karena Jepang memiliki kekuatan ekonomi yang memungkinkan Jepang untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia, sebagai negara dengan ekonomi yang maju Jepang memiliki kapasitas finansial yang kuat yang ditunjukkan dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi. Ketergantungan Jepang terhadap perdagangan dengan Rusia relatif kecil, perdagangan Jepang di dominasi oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, Jepang juga telah banyak menjalankan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lainnya seperti kerja sama ekonomi regional RCEP dan kerja sama ekonomi multilateral CPTPP. Kemudian dari segi militer walaupun dalam kapabilitas militer Jepang tidak kuat seperti Rusia karena sejarah Jepang yang kalah dari Perang Dunia II dan diberi sanksi dilarang keras untuk mengembangkan kekuatan militernya dan hanya diperbolehkan memiliki Pasukan Bela Diri (JSDF) oleh Amerika, tetapi Jepang telah melakukan modernisasi militernya untuk pertahanan diri seperti meningkatkan anggaran pertahanan dan pengembangan rudal dalam menghadapi ancaman regional dan juga Jepang menjalankan kerja sama dengan berbagai aliansi keamanan yaitu aliansi dengan QUAD untuk mendukung keamanan dan pertahanan Jepang.

BAB 4

POLITIK DOMESTIK

Politik domestik menjadi faktor terakhir yang akan dibahas untuk menjawab rumusan masalah. Dalam teori Coplin, politik domestik menjadi faktor yang akan menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Coplin berpendapat bahwa untuk menentukan cara kerja politik luar negeri yang mana dapat dilihat oleh situasi di dalam negeri suatu negara, kondisi dalam negeri suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri. Dalam politik domestik terdapat aktor-aktor politik dalam negeri berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri yaitu *Partisan Influencer* atau partai politik yang pemberi pengaruh. Kedua, *Bureaucratic Influencer* atau birokrasi pemerintahan yang pemberi pengaruh. Ketiga, *Interest Influencer* atau pemberi pengaruh dari individu yang memiliki kepentingan yang sama. Keempat, *Mass Influencer* atau publik yang pemberi pengaruh (Coplin 1971, 70). Maka dari itu penulis akan menganalisis politik domestik untuk melihat situasi di dalam negeri negara Jepang, mengambil keputusan untuk mengeluarkan sanksi ekonomi yang berat untuk Rusia.

4.1. *Partisan Influencer* atau Peran Pemerintah dan Partai Politik

Partisan Influencer dalam hal ini peran aktor pemerintahan dan partai-partai politik dalam negeri dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri (Coplin 1971, 72) . Perdana Menteri Fumio Kishida sebagai pemimpin pemerintahan yang memenangkan pemilihan sebagai pemimpin Jepang pada tahun

2021 diusung dari Partai Demokrat Liberal (LDP), berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Dalam situasi konflik yang terjadi yaitu invasi Rusia dan Ukraina pada tahun 2022, di sini Partai Demokrat Liberal (LDP) mengecam keras tindakan Rusia dan mendukung sanksi untuk Rusia. Para petinggi Partai Demokrat Liberal (LDP) seperti Sekretaris Jenderal Motegi Toshimitsu yang telah ditunjuk sebagai kepala kantor pusat tanggapan masalah Ukraina mengecam perbuatan Rusia dengan menyampaikan bahwa: “Pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan serangan terhadap pondasi tatanan internasional, tindakan ini tidak dapat diabaikan dari perspektif negara kita” (Liberal Democratic Party 2022). Kemudian Juga Wakil Presiden Partai Demokrat Liberal Taro Aso juga menanggapi atas invasi Rusia ke Ukraina dengan menyampaikan: “Kami tidak akan pernah menerima perubahan sepihak terhadap status quo melalui penggunaan kekuatan. Kami sebagai anggota Parlemen harus selalu berfikir dan bersiap untuk melindungi kedaulatan dan wilayah Jepang sebagai sebuah negara” (The Sankei Shimbun 2022).

Kemudian disampaikan oleh Perdana Menteri Kishida di konferensi pers pada 25 Februari 2022 yaitu: “Invasi Rusia ke Ukraina merupakan situasi serius yang merusak pondasi tatanan internasional dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, Rusia mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan, tindakan tersebut tidak dapat diterima dan saya mengutuknya dengan dengan keras. Kami akan menanggapi dengan bekerja sama erat dengan negara G7 dan masyarakat internasional secara keseluruhan” (Prime Minister’s Office of Japan 2022).

Perdana Menteri Kishida kini harus memimpin Jepang dengan menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Partai Demokrat Liberal (LDP) Kishida memenangkan 261 kursi bersama dengan koalisinya yaitu Komeito memperoleh 32 kursi, sehingga bersama-sama memenangkan 293 kursi di majelis rendah dari 465 kursi yang ada. Kemenangan ini melampaui kursi yang dibutuhkan untuk mencapai stabilitas pemilihan yaitu 233 kursi, yang mana ini dapat memberi kendali atas komite parlemen sehingga memudahkan dalam pengesahan kebijakan dan undang-undang (McCurry 2021).

Oleh karena itu Kishida berani dalam menanggapi dengan kebijakan yang lebih tegas demi keamanan negaranya, mengambil langkah untuk mendekatkan negara Jepang dengan negara G7 untuk bergabung dengan sanksi ekonomi yang dipimpin oleh Amerika. Kemudian Jepang telah melonggarkan pembatasan militer, serta memperdalam hubungan keamanan dengan negara lainnya yang terancam keamanannya dari konflik Rusia ini (Gallo 2024). Kishida memajukan visinya yaitu untuk perdamaian yang bertujuan untuk menjaga dan memperkuat ketertiban damai di kawasan dan akan meningkatkan peran diplomatik dan keamanannya (The Government of Japan 2022).

4.2. *Bureaucratic Influencer* atau Peran Birokrasi Pemerintahan

Selanjutnya yaitu aktor *Bureaucratic Influencer* atau peran birokrasi pemerintahan yang mana aktor dalam negeri tersebut dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara. *Bureaucratic Influencer* tersebut menurut Coplin yaitu kepada individu atau organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan (Coplin 1971, 71).

Oleh karena itu di sini Kementerian Luar Negeri memainkan peran utama dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, yang mana Kementerian Luar Negeri menjadi koordinasi dengan negara-negara di luar. Yoshimasa Hayashi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang di kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida, yang mana berasal dari Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2022b). Dalam konflik invasi Rusia ke Ukraina, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi setelah menerima informasi tentang invasi Rusia ke Ukraina telah memanggil Duta Besar Federasi Rusia untuk segera menghentikan invasinya ke Ukraina dan menarik pasukannya militernya, Yoshimasa Hayashi telah menyampaikan: “Kami tidak akan pernah menoleransi perubahan sepihak terhadap status quo dengan kekerasan, jadi kami mengutuk keras invasi ini” (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2022a).

Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi juga telah melakukan kunjungan secara mendadak ke Ukraina untuk memberikan dukungan Jepang kepada Ukraina, yang mana Hayashi telah mengadakan konferensi guna mempromosikan pemulihan ekonomi Ukraina (Johnson 2023). Kementerian Luar Negeri Jepang mendukung sanksi untuk Rusia karena Jepang harus menjaga kredibilitasnya sebagai negara demokratis dan sekutu Amerika Serikat serta memperkuat koordinasi dengan negara Eropa dan Amerika dalam menghadapi Rusia.

4.3. *Interest Influencer* atau Peran Kelompok Kepentingan

Selanjutnya yaitu *Interest Influencers*, yang mana terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama dan memiliki kepentingan yang sama. Aktor dalam negeri tersebut dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara (Coplin 1971, 74). Kelompok kepentingan yang berperan yaitu perusahaan-

perusahaan Jepang yaitu seperti Mitsui & Co dan Mitsubishi Corp, memiliki kepentingan dalam proyek dengan Rusia, dua perusahaan tersebut memiliki investasi saham besar di proyek energi Sakhalin-2 serta kontribusi dalam mengamankan pasokan LNG untuk jangka panjang, murah dan stabil, Jepang bergantung pada impor energi Rusia karena Jepang kurang akan sumber daya alam (Reuters 2022a). Konflik Rusia dan Ukraina dapat memicu krisis energi Jepang jika Jepang menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, dalam statement yang dikeluarkan oleh perusahaan Mitsui & Co menyampaikan: “kami khawatir akan krisis energi di Jepang tetapi kami prihatin dengan situasi di Ukraina, Kami mematuhi sanksi internasional terkait yang dijatuhkan kepada Rusia dan kami mengikuti perkembangannya dengan saksama” (Mitsui & Co 2022) dan statement Mitsubishi Corp menyampaikan: “kami telah membentuk komite darurat untuk memantau penerapan berbagai sanksi terhadap Rusia yang diputuskan oleh komunitas internasional dan kami sangat prihatin dengan situasi terkini di Rusia dan Ukraina”(Mitsubishi Corporation 2022).

Selain itu kekhawatiran dari perusahaan bisnis Jepang yaitu Keidanren merupakan Federasi Bisnis Jepang menyatakan bahwa sanksi bisa berdampak negatif pada hubungan ekonomi Jepang dan Rusia, dalam pernyataan pers nya ketua Federasi Bisnis Jepang Masakazu Tokura menyatakan: “Biaya bisnis meningkat seiring dengan jatuhnya rubel akibat sanksi ekonomi terhadap Rusia dan kesulitan dalam transfer uang internasional serta penerimaan pembayaran mulai mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Jepang, dampak ekonomi pada tingkat tertentu tidak dapat dihindari. Saya sangat sedih dengan

meningkatnya jumlah korban di konflik Ukraina dan saya mengutuk keras invasi Rusia” (Keidanren 2022).

Dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang lebih terkena dampak dari kebijakan sanksi ekonomi Jepang terhadap Rusia. Tetapi kelompok kepentingan yaitu perusahaan-perusahaan tersebut tidak secara terang-terangan menolak kebijakan, mereka menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintahan tetapi tetap mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perusahaan.

4.4. *Mass Influencer* atau Peran Masyarakat

Tipe yang terakhir *Mass Influencer* atau opini masyarakat berpengaruh dijadikan pertimbangan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Melalui penyebaran informasi di media akan menciptakan sebuah opini masyarakat yang artinya opini publik dapat dibentuk oleh media massa dan digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk mendukung keputusannya (Coplin 1971, 76) Oleh karena itu opini masyarakat berperan mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara.

Dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina keputusan Jepang mengeluarkan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia karena didukung oleh masyarakat Jepang secara positif. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Kyodo News terdapat 85,8% publik mendukung sanksi Jepang terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dan mendukung Perdana Menteri Kishida Untuk bersikap tegas terhadap Rusia dan 91,2% publik mendukung pemerintah Jepang untuk membuka pengungsi dari Ukraina yang terkena perang (Kyodo News 2022a). Media Jepang telah banyak melaporkan perang berita di Ukraina, terutama pada tahap awal perang dengan

kehancuran akibat rudal Rusia, kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Rusia, dan penderitaan yang menimpa masyarakat Ukraina yang tidak bersalah. Oleh sebab itu sebagian penduduk Jepang merespon konflik perang di Ukraina dengan positif. pemerintah Jepang dapat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi terhadap Rusia

Maka dari itu, dalam faktor politik domestik menurut teori dari Coplin, penulis menganalisis bahwa mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia karena adanya pengaruh dari aktor-aktor domestik yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Aktor yang pertama yaitu *Partisan Influencer* yaitu Partai Demokrat Liberal (LDP) mendukung kuat Perdana Menteri Kishida untuk mengambil sikap tegas terhadap Rusia demi mempertahankan tatanan internasional yang damai. Kedua aktor *Bureaucratic Influence* yaitu Kementerian Luar Negeri Jepang merupakan organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah memainkan peran utama dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, yang mana Kementerian Luar Negeri menjadi koordinasi dengan negara-negara di luar, menjaga hubungan dengan negara G7 sehingga mendorong kebijakan sanksi terhadap Rusia. Ketiga aktor *Interest Influencers* yaitu perusahaan-perusahaan Jepang seperti perusahaan energi Jepang, memiliki peran dalam menentukan sejauh mana Jepang dapat memberlakukan sanksi terhadap Rusia tanpa merugikan perekonomian domestik. Terakhir *Mass Influencer* yaitu pendapat masyarakat Jepang meminta pemerintah Jepang untuk menghukum Rusia.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam studi kasus yang penulis analisis kesimpulan yang dapat diambil tentang perbedaan pendekatan Jepang antara masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Perdana Menteri Fumio Kishida dalam menanggapi konflik Rusia dengan Ukraina. Jepang di masa Perdana Menteri Shinzo Abe menanggapi konflik aneksasi Rusia di Krimea dengan sangat hati-hati demi tidak merusak hubungan bilateral, sedangkan Perdana Menteri Fumio Kishida menanggapi konflik invasi Rusia dengan Ukraina dengan tegas serta menerapkan sanksi ekonomi yang berat untuk Rusia. Sehingga dengan menggunakan teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin penelitian ini akan menjawab rumusan masalah mengapa Perdana Menteri Fumio Kishida mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia pada tahun 2022.

Teori Pengambilan Keputusan Coplin	Penjelasan Teori Coplin	Penerapan Teori Coplin
Konteks Internasional	Geografis: Memainkan peran penting politik luar negeri, kedekatan geografis akan memunculkan hubungan antar negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Kedekatan geografis Jepang dan Rusia ternyata menjadi ancaman bagi Jepang. - Invasi Rusia ke Ukraina berpengaruh terhadap ketidakstabilan Kawasan Jepang. - Karena Rusia juga telah meningkatkan kerja sama militer dengan Tiongkok dan Rusia juga telah meningkatkan aktivitas militernya di Timur Jauh yang mana itu dekat dengan Kepulauan Kuril yang sampai saat ini masih disengketakan oleh Jepang dan Rusia.

Teori Pengambilan Keputusan Coplin	Penjelasan Teori Coplin	Penerapan Teori Coplin
	<p>Ekonomi: Arus barang, jasa maupun modal, dan ketergantungan ekonomi antar negara yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan politik luar negeri suatu negara, negara seringkali harus memperhatikan hubungan ekonomi sebelum mengambil keputusan.</p> <p>Politik: Hubungan dengan negara lain dalam lingkungan kawasan sangat berperan dalam keputusan politik luar negeri suatu negara. Aliansi dapat berdampak besar terhadap anggota dan bukan anggotanya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan perdagangan antara Jepang dengan Rusia terbatas dan relatif kecil nilainya. - Jepang memiliki ketergantungan energi ke Rusia. - Hal ini tidak menghalangi Jepang memberikan sanksi untuk Rusia, solidaritas Jepang ikut mendukung tatanan global yang aman bersama negara G7. - Jepang dapat melakukan diversifikasi energi. - Aliansi Jepang dengan AS sejak tahun 1951, membuat Jepang yakin untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Jepang dan AS bekerja sama untuk menunjukkan pentingnya menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas.
Kapabilitas Ekonomi dan Militer	<p>Kapabilitas Ekonomi Jepang: PDB perkapita negara rendah atau tinggi, ekonomi bergantung kepada pada negara lain atau dapat produksi industri yang bervariasi, dan kesulitan dalam neraca pembayaran karena kurang ekspor untuk menutupi permintaan konsumen dan investasi atau sangat terlibat dalam perdagangan dunia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jepang negara dengan perekonomian maju dan terbesar ketiga di dunia, PDB Jepang sebesar \$4,26 triliun dan PDB per kapita sebesar \$34,017 pada tahun 2022. - Kekuatan industri dan potensi inovasi teknologi yang bagus Jepang memberikan pengaruh terhadap arus keuangan dan perdagangan global untuk maju. - Jepang juga telah banyak menjalankan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan ekonominya dengan negara-negara lainnya seperti kerja sama ekonomi regional RCEP dan kerja sama ekonomi multilateral CPTPP.

Teori Pengambilan Keputusan Coplin	Penjelasan Teori Coplin	Penerapan Teori Coplin
	<p>Kapabilitas Militer Jepang: Angkatan bersenjata konvensional yang terlatih dengan baik dan dapat digunakan untuk memelihara stabilitas dalam negeri atau angkatan bersenjata konvensional yang tidak terlatih dengan baik dan bergantung dalam dukungan luar negeri yang tujuannya untuk menjaga stabilitas dalam negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jepang tidak memiliki militer sekuat Rusia karena sejarah Jepang yang kalah dari Perang Dunia II dan diberi sanksi dilarang keras untuk mengembangkan kekuatan militernya dan hanya diperbolehkan memiliki Pasukan Bela Diri (JSDF) oleh Amerika. - Jepang telah melakukan modernisasi militernya untuk pertahanan diri seperti meningkatkan anggaran pertahanan dan pengembangan rudal dalam menghadapi ancaman regional dan juga. - Jepang menjalankan kerja sama dengan berbagai aliansi keamanan yaitu aliansi dengan QUAD untuk mendukung keamanan dan pertahanan Jepang.
Politik Domestik	<p><i>Partisan Influencer:</i> Peran aktor pemerintahan dan partai-partai politik dalam negeri dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri.</p> <p><i>Bureaucratic Influencer:</i> Peran birokrat menyalurkan informasi-informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan tersebut.</p> <p><i>Interest Influencer</i> Terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama dan memiliki kepentingan yang sama. Aktor dalam negeri tersebut dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara.</p>	<p>Perdana Menteri Fumio Kishida sebagai pemimpin pemerintahan Jepang pada tahun 2021 berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri, diusung oleh dari Partai Demokrat Liberal (LDP). LDP mendukung sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia.</p> <p>Kementerian Luar Negeri Jepang memainkan peran utama dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, yang mana Kementerian Luar Negeri menjadi koordinasi dengan negara-negara di luar, harus menjaga kredibilitasnya sebagai negara demokratis.</p> <p>Kelompok kepentingan yang berperan yaitu perusahaan Jepang yaitu perusahaan Jepang Mitsui & Co dan Mitsubishi Corp, perusahaan bisnis Keidanren, memiliki peran dalam menentukan sejauh mana Jepang dapat memberlakukan sanksi terhadap Rusia tanpa merugikan perekonomian domestik.</p>

Teori Pengambilan Keputusan Coplin	Penjelasan Teori Coplin	Penerapan Teori Coplin
	<p><i>Mass Influencer</i> Opini masyarakat berpengaruh pada saat menyusun kebijakan luar negeri. Melalui penyebaran informasi di media akan menciptakan sebuah opini masyarakat yang artinya opini publik dapat dibentuk oleh media massa dan digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk mendukung keputusannya.</p>	<p>85,8% masyarakat Jepang mendukung sanksi Jepang terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dan mendukung Perdana Menteri Kishida Untuk bersikap tegas terhadap Rusia</p>

Tabel 5.1.1 Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada analisis mengapa Perdana Menteri Fumio Kishida mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia pada tahun 2022. Penelitian ini juga secara spesifik hanya menjelaskan faktor-faktor dari teori William D. Coplin yang membuat Perdana Menteri Fumio Kishida mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan membahas isu yang sama dapat membahas bagaimana kelanjutan hubungan dari Jepang dan Rusia mengingat bahwa Perdana Menteri Jepang sudah ada pergantian, tentu pergantian kepemimpinan juga akan memberikan pandangan yang berbeda terkait hubungan kedua negara kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, Frisca. 2015. "UPAYA PEMERINTAH JEPANG DALAM PERELOKASIAN PANGKALAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI OKINAWA." *Jurnal Interdependence* 3 (1).
<https://doi.org/10.30872/.v3i1.1334>.
- Antuli, Rezky Ramadhan, Riady Ibnu Khaldun, M. Chaerul Anwar, Muhammad Sajidin, Dinar Hafidz Adi Wardhana, and Dwi Rianisa Mausili. 2024. "Analisis Perspektif Security Dilemma Di Kawasan Asia Timur: Transformasi Pertahanan Dan Keamanan Jepang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (3): 5798–5810.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11025>.
- Ba, Chunying. 2023. "The Revival of the Quadrilateral Security Dialogue: Causes and Characteristics." *Journal of Research in Social Science and Humanities* 2 (3): 16–23.
- Banerjee, Rishma. 2022. "The Vostok Military Exercises 2022: Three Takeaways." *Modern Diplomacy*. October 19, 2022.
<https://moderndiplomacy.eu/2022/10/19/the-vostok-military-exercises-2022-three-takeaways/>.
- Bank Data Teikoku. 2022. "Survey on the status of Japanese companies' 'expanding into Russia.'" <https://www.tdb.co.jp/report/economic/ljwxjlpdaq14/>.
- Brown, James. 2019. "Japanese Investment in Russia Floundering Despite Arctic Energy Deal." *The Moscow Times*. October 16, 2019.
<https://www.themoscowtimes.com/2019/10/16/japanese-investment-floundering-despite-arctic-energy-deal-a67754>
- Brown, James D.J. 2014. "Hajime!—The Causes and Prospects of the New Start in Russian-Japanese Relations." *Asia Policy*, no. 18, 81–110.
- Brunk, Ingrid (Wuerth), and Monica Hakimi. 2022. "Russia, Ukraine, and the Future World Order." *American Journal of International Law* 116 (4): 687–97. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.69>.
- Bubnova, N. I. 2022. "Total Sanctions in the Context of 'Integrated Deterrence': Western Countries' Response to Russia's Special Military Operation in Ukraine (2022)." *Herald of the Russian Academy of Sciences* 92 (Suppl 13): S1230–39. <https://doi.org/10.1134/S1019331622190054>.

- Carnegie Endowment for International Peace. 2012. "Russia's Pacific Future: Solving the South Kuril Islands Dispute." December 11, 2012. <https://carnegieendowment.org/research/2013/01/russias-pacific-future-solving-the-south-kuril-islands-dispute?lang=en>.
- Centre for Russian Studies. 2018. "Okabe Yoshihiko: Russia's Violation of Fundamental Rules of International Law after the World War II: View from Japan." July 11, 2018. https://r-studies.org/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=70004&lang=eng.
- Congressional Research Service. 2021. "Russian Military Exercises." CRS In Focus. <https://sgp.fas.org/crs/row/IF11938.pdf>.
- . 2023. "The 'Quad': Cooperation Among the United States, Japan, India, and Australia." CRS In Focus. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11678>.
- Coplin, William David. 1971. *Introduction To International Politics: A Theoretical Overview*. 1st ed. Markham Political Science Series. Chicago: Markham Publishing Company.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. California: Sage Publications.
- Curtis, Lisa, Jacob Stokes, Joshua Fitt, and Andrew Adams. 2022. "Operationalizing the Quad." Center for a New American Security. https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/CNAS+Report-IPS-Quad_Final.pdf.
- Fujikura, Katsunori, Dhugal Lindsay, Hiroshi Kitazato, Shuhei Nishida, and Yoshihisa Shirayama. 2010. "Marine Biodiversity in Japanese Waters." *PLoS ONE* 5 (8): e11836. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011836>.
- Gallo, William. 2024. "Kishida Reshaped Japan's Foreign Policy, but Couldn't Survive Domestic Woes." Voa News. August 14, 2024. <https://www.voanews.com/a/kishida-reshaped-japan-s-foreign-policy-but-couldn-t-survive-domestic-woes-/7742199.html>.
- Goble, Paul A. 2018. "Japanese Expert: Ethnic Ukrainians Form 60% of Northern Territories' (Kuriles') Population." Euromaidan Press. June 13, 2018. <https://euromaidanpress.com/2018/06/13/japanese-expert-ethnic-ukrainians-form-60-of-northern-territories-kuriles-population/>.

- Golubkova, Katya, and Yuka Obayashi. 2024. “Rival LNG Supplies, Sakhalin’s Depleting Fields Give Japan an Exit from Russian Gas.” *Reuters*, December 11, 2024, sec. Energy. <https://www.reuters.com/business/energy/rival-lng-supplies-sakhalins-depleting-fields-give-japan-an-exit-russian-gas-2024-12-11/>.
- Gorenburg, Dmitry, Paul Schwartz, Brian Waidelich, and Elizabeth Wishnick. 2023. “Russian-Chinese Military Cooperation.” CNA Corporation.
- Guenette, Justin Damien, Philip George Kenworthy, and Collette Mari Wheeler. 2022. *Implications of the War in Ukraine for the Global Economy*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/37372>.
- International Trade Centre. 2023a. “Bilateral Trade between Japan and Russian Federation Product: TOTAL All Products Exports.” https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c392%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1.
- . 2023b. “Bilateral Trade between Japan and Russian Federation Product: TOTAL All Products Imports.” https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c392%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1.
- Ito, Shin. 2018. “Japan’s Critical Leadership Role on Free and Fair Trade.” *Center for Strategi & International Study*, May. <https://www.csis.org/analysis/japans-critical-leadership-role-free-and-fair-trade>.
- Iwashita, Akihiro. 2020. “Bested by Russia: Abe’s Failed Northern Territories Negotiations.” *Kennan Cable*, no. 60 (November). https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/KI_201105_cable%2060_v2_0.pdf.
- JNTO. 2024. “Trends in Visitor Arrivals to Japan.” Japan Tourism Statistics | 日本の観光統計データ. 2024. <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/>.
- Johnson, Jesse. 2023. “Japan Top Diplomat Makes First Visit to Ukraine since War’s Start.” *The Japan Times*. September 9, 2023. <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/09/09/japan/politics/japan-ukraine-foreign-minister-yoshimasa-hayashi/>.
- Kaczynski, Vlad. 2007. “The Kuril Islands Dispute Between Russia and Japan: Perspectives of Three Ocean Powers.” *Center for Security Studies, Russian Analytical Digest*, , no. 20, 6–8.

- Kamata, Jio. 2023. "The Invasion of Ukraine Turned Japan's Russia Policy on Its Head." *The Diplomat*, February 23, 2023. <https://thediplomat.com/2023/02/the-invasion-of-ukraine-turned-japans-russia-policy-on-its-head/>.
- Keidanren. 2022. "Chairman Tokura's Statements and Comments at His Press Conference." March 7, 2022. <https://www.keidanren.or.jp/en/speech/kaiken/2022/0307.html>.
- Kim, Eunseo. 2018. "The CPTPP and Its Implications for Japan." *The Diplomat*. May 4, 2018. <https://thediplomat.com/2018/05/the-cptpp-and-its-implications-for-japan/>.
- Kireeva, Anna. 2019. "A New Stage in Russia-Japan Relations: Rapprochement and Its Limitations." *Asia-Pacific Review* 26 (2): 76–104. <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1692526>.
- Kitade, Daisuke. 2016. "Considering the Effects of Japanese Sanctions Against Russia." Mitsui Global Strategic Studies Institute Europe & CIS Dept.
- Kluge, Janis. 2024. "Russia-China Economic Relations: Moscow's Road to Economic Dependence." *SWP Research Paper*, May. <https://doi.org/10.18449/2024RP06>.
- Kyodo News. 2022a. "86% Back Japan's Sanctions on Russia over Invasion in Ukraine: Poll." *Kyodo News+*. March 20, 2022. <https://english.kyodonews.net/news/2022/03/65dff5d6bb6c-breaking-news-support-rate-for-japan-cabinet-rises-to-601-kyodo-poll.html>.
- . 2022b. "Japan Says Sakhalin Energy Projects Do Not Contradict Russia Sanctions." *Kyodo News+*. May 15, 2022. <https://english.kyodonews.net/news/2022/05/e11e09f86c85-japan-says-sakhalin-energy-projects-do-not-contradict-russia-sanctions.html>.
- Li, Zhuoran. 2021. "The Challenges and Opportunities of Japan-Russia Economic Relations." February 20, 2021. <https://thediplomat.com/2021/02/the-challenges-and-opportunities-of-japan-russia-economic-relations/>.
- Liberal Democratic Party. 2022. "'Implement Strict Sanctions': Ukraine Issue Task Force Established to Discuss with Government." February 25, 2022. <https://www.jimin.jp/news/information/202851.html>.
- Lim, Kyunghan, and Jaeho Kim. 2022. "Impacts of Russia-Ukraine War on East Asian Regional Order." *International Journal of Korean Unification Studies* 31 (2): 31–59. <https://doi.org/10.33728/IJKUS.2022.31.2.002>.

- Mankoff, Jeffrey. 2022. "Russia's War in Ukraine: Identity, History, and Conflict." Center for Strategic and International Studies.
- Marsono, Deni D.A.R, and Novky Asmoro. 2018. "IMPROVEMENT OF JAPANESE MILITARY CAPABILITIES AND IMPLICATIONS ON INDONESIA'S NATIONAL DEFENSE." *Jurnal Pertahanan* 4 (2): 89–103. <https://doi.org/10.33172/jp.v4i2.286>.
- McCurry, Justin. 2021. "Ruling Party of Fumio Kishida Wins Comfortable Victory in Japanese Election." *The Guardian*, January 11, 2021, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2021/oct/31/ruling-party-of-fumio-kishida-wins-smaller-majority-in-japanese-election>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1960. "Japan-U.S. Security Treaty: Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan And The United States Of America." January 19, 1960. <https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>.
- . 2014. "The Northern Territories Working Toward the Conclusion of a Peace Treaty." Tokyo, Japan. <https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/pamphlet.pdf>.
- . 2016. "Japan-Russia Summit Meeting." Ministry of Foreign Affairs of Japan. May 7, 2016. https://www.mofa.go.jp/erp/rss/northern/page4e_000427.html.
- . 2022a. "Foreign Minister Hayashi Summons Mr. Mikhail Y. Galuzin Ambassador of the Russian Federation to Japan." February 24, 2022. https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_003087.html.
- . 2022b. "Profile of Minister for Foreign Affairs Hayashi Yoshimasa." August 10, 2022. <https://www.mofa.go.jp/about/hq/profile/hayashi.html>.
- . 2023. "Russia's Aggression Against Ukraine and Japan's Response." <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2023/pdf/pdfs/1b.pdf>.
- Mitsubishi Corporation. 2022. "On the Current Situation in Russia and Ukraine." July 13, 2022. <https://www.mcgc.com/english/information/01218.html>.
- Mitsui & Co. 2022. "Mitsui's Business Update on Ukraine Situation." March 4, 2022. https://www.mitsui.com/jp/en/release/2022/1242953_13406.html.
- New Europe Center. 2023. "Key Messages from the Speakers from the Session 3 of the Third Ukraine-Japan Forum." March 9, 2023. <https://neweurope.org.ua/en/klyuchovi-mesedzhi-spikeriv-tretoy-paneli-tretogo-forumu-ukrayina-yaponiya/>.

- Nishida, Michiru. 2023. "Changing Security Environment in East Asia and Its Implications on Japan's Nuclear Policy." *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 6 (2): 327–45.
<https://doi.org/10.1080/25751654.2023.2285024>.
- Osborn, Andrew, and Polina Nikolskaya. 2022. "Russia's Putin authorises 'special military operation' against Ukraine." *Reuters*, February 24, 2022, sec. Europe. <https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-authorises-military-operations-donbass-domestic-media-2022-02-24/>
- O'Shea, Paul, and Sebastian Maslow. 2024. "Rethinking Change in Japan's Security Policy: Punctuated Equilibrium Theory and Japan's Response to the Russian Invasion of Ukraine." *Policy Studies* 45 (3–4): 653–76.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2024.2309218>.
- Panov, A.N. 2020. "The Soviet-Japanese Joint Declaration of 1956: A Difficult Path to Signing, a Difficult Fate after Ratification." *Russian Japanology Review* 3 (2). <https://doi.org/10.24411/2658-6789-2020-10007>.
- Power, John. 2023. "At G7, Japanese PM Pledges 'Unwavering Solidarity' with Ukraine." *Al Jazeera*. May 21, 2023.
<https://www.aljazeera.com/news/2023/5/21/at-g7-japanese-pm-pledges-unwavering-solidarity-with-ukraine>.
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. 1947. "THE CONSTITUTION OF JAPAN." May 3, 1947.
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html.
- Prime Minister's Office of Japan. 2022. "Press Conference by the Prime Minister." February 25, 2022.
https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202202/_00013.html.
- . 2023. "Japan Stands with Ukraine."
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/pdf/jp_stands_with_ukraine_eng.pdf.
- Reuters. 2022a. "Japan Will Not Abandon Sakhalin-2 LNG Stake, PM Kishida Says," March 31, 2022, sec. Asia Pacific.
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-will-not-abandon-sakhalin-2-lng-stake-kishida-says-2022-03-31/>.
- . 2022b. "Russia Deploys Defence Missile System on Kuril Island near Japan," December 6, 2022, sec. Aerospace & Defense.
<https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-deploys-defence-missile-system-kuril-island-near-japan-2022-12-06/>.

- Riise, Tanvi. 2022. "Japan's Quest for Energy Security in the 'New' World of Geopolitics." *Observatory Indo Pacific*, May. <https://www.sciencespo.fr/ceri/observatory-indo-pacific/wp-content/uploads/2022/07/IP-Essay-Tanvi-RIISE-Japans-energy-security.pdf>.
- Rimland, Benjamin. 2017. "Japan's Maritime Strategy and the Dynamics of Denial." July 25, 2017. <https://www.tokyoreview.net/2017/07/japans-maritime-strategy-and-the-dynamics-of-denial/>.
- Robst, John, Solomon Polachek, and Yuan-Ching Chang. 2007. "Geographic Proximity, Trade, and International Conflict/Cooperation." *Conflict Management and Peace Science* 24 (1): 1–24.
- Sakaki, Alexandra. 2023. "A New Course for Japan's Security Policy - The Historic Decision on Military Armament." *SWP Comment*, March. <https://doi.org/doi:10.18449/2023C13>.
- Shagina, Maria. 2018. "Japan and its Dilemma with Sanctions Policy Towards Russia." *Focus Asia: Perspective and Analysis*. Institute for Security & Development Policy. <https://www.isdp.eu/publication/japan-dilemma-sanctions-policy-towards-russia/>.
- Shimbun, Yomiuri. 2022a. "Far East Exercises Show Drain on Russian Forces." September 6, 2022. <https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/defense-security/20220906-56281/>.
- . 2022b. "Russia begins large-scale military exercises in Far East." September 2, 2022. <https://japannews.yomiuri.co.jp/world/russia/20220902-55602/>.
- Shimizu, Kazushi. 2022. "RCEP'S GREAT IMPACT ON JAPAN AND EAST ASIAN ECONOMIES." *AJISS-Commentary: The Association of Japanese Institutes of Strategic Studies*, no. 295 (August). https://www.jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/2022/08/03/Commentary295.pdf.
- Shynkaruk, Kateryna. 2023. "Ukraine's push for NATO membership is rooted in its European past – and its future." *The Conversation*. September 8, 2023. <http://theconversation.com/ukraines-push-for-nato-membership-is-rooted-in-its-european-past-and-its-future-209839>.
- Smith, Jeff M. 2020. "The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo–Pacific." Washington, DC: The Heritage Foundation. <http://report.heritage.org/bg3481>.

- Sugiyama, Tadashi. 2022. "Zelenskyy Says Russia Has No Right to Japan's Northern Isles." *The Asahi Shimbun*. October 9, 2022. <https://www.asahi.com/ajw/articles/14738765>.
- Swift, Rocky, and Yuka Obayashi. 2022. "Explainer: Why Japan's Power Sector Depends so Much on LNG." *Reuters*, March 10, 2022, sec. Asia Pacific. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/why-japans-power-sector-depends-so-much-lng-2022-03-10/>.
- TASS. 2022. "No New Steps in Japan-Russia Economic Cooperation Now Possible — PM Kishida." *Russian News Agency TASS*. March 17, 2022. <https://tass.com/world/1423367>.
- The American Presidency Project. 1951. "Statement by the President Upon Signing the Mutual Security Act." October 10, 1951. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-president-upon-signing-the-mutual-security-act>.
- The Government of Japan. 2022. "The Five Pillars for Achieving PM Kishida's Realism Diplomacy for a New Era." *Japan Gov*. September 16, 2022. https://www.japan.go.jp/kizuna/2022/09/realism_diplomacy_for_a_new_era.html.
- The Sankei Shimbun. 2022. "Aso 'Highly Appreciates' Prime Minister's Russia Sanctions." *Article politics situation. Sankei Shimbun: Sankei News*. March 3, 2022. <https://www.sankei.com/article/20220303-XY466A4TYVMZVFAMDF4E6IQMJQ/>.
- Tsuneo, Watanabe. 2023. "What's New in Japan's Three Strategic Documents." *Center for Strategic & International Study*, February. <https://www.csis.org/analysis/whats-new-japans-three-strategic-documents>.
- U.S. Energy Information Administration. 2023. "Country Analysis Brief: Japan." Washington, DC: U.S. Energy Information Administration (EIA). https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Japan/japan.pdf.
- Vasquez, John A. 1995. "Why Do Neighbors Fight? Proximity, Interaction, or Territoriality." *Journal of Peace Research* 32 (3): 277–93.
- World Bank. 2023. "GDP (Current US\$) - Japan." 2023. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=JP>.
- World Integrated Trade Solution. 2022. "Japan Trade Summary 2022." 2022. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JPN/Year/LTST/Summarytext>.

- Yamaguchi, Mari. 2022a. "Japan formally revokes Russia's 'most favored nation' status." AP News. April 20, 2022. <https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-tokyo-europe-moscow-e264ff718a4c998fe66c67e687864b12>.
- . 2022b. "Japan to Keep Stake in Russian Energy Project in Sakhalin." AP News. November 4, 2022. <https://apnews.com/article/europe-business-japan-moscow-cd4d5fb6e50eba6387c0abdbc53e2bc3>.
- . 2023. "Japan Cabinet OKs Record Military Budget to Speed up Strike Capability, Eases Lethal Arms Export Ban." AP News. December 23, 2023. <https://apnews.com/article/japan-military-budget-us-china-missile-5e1e2c40890b3ca8ea682c2dc91f9553>.
- Zukhra, Hamdamova, and M. Kh Kamilova. 2024. "Key Directions of Japan's Economic Development (1950 – Present)." *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1 (4): 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.228>.

